

BUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi

Edisi 01

Volume 13/Februari 2026
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



76 TAHUN BAKTI IMIGRASI UNTUK NEGERI

Langkah Transformasi melalui Program Aksi



Direktorat Jenderal Imigrasi mengucapkan

مَرْحَبًا يَا رَمَضَانُ

Marhaban Yaa

1447 H/2026 M

RAMADAN

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa



BAKTI IMIGRASI UNTUK NEGERI

Salam hangat bagi seluruh pembaca. Edisi kali ini hadir bertepatan dengan momentum 76 Tahun Bakti Imigrasi untuk Negeri. Angka ini menjadi refleksi transformasi yang kami rangkum dalam *Laporan Utama* mengenai peresmian prasasti 18 kantor imigrasi (kanim) baru. Langkah ekspansi ini diperkuat oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, yang menekankan pemerataan layanan melalui penambahan kanim serta atase imigrasi di perwakilan RI.

Inovasi layanan menjadi sorotan utama dengan peluncuran resmi *Golden Citizen of Indonesia* (GCI). Kami mengulas tuntas perbedaan antara GCI dan *golden visa* agar publik mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam rubrik *Informatips*. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kebijakan sinergis antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang kini memudahkan perekaman paspor dinas di seluruh Indonesia, termasuk penunjukan Kanim Surabaya sebagai proyek percontohan pengambilan data biometrik. Bagi masyarakat umum, kami hadirkan informasi mengenai kehadiran Unit Layanan Paspor (ULP) Mall Ciputra Seraya Pekanbaru serta tutorial penggunaan empat lokasi gerbang otomatis (*autogate*) baru.

Di sisi penegakan hukum, ketegasan Imigrasi tetap ditunjukkan. Kami melaporkan keberhasilan pembongkaran sindikat *love scamming* internasional di Tangerang hingga deportasi warga negara Selandia Baru di Denpasar. Rubrik *Opini* juga membedah dampak penerapan KUHAP baru terhadap prosedur keimigrasian serta pembelajaran berharga dari studi banding ke ICE Amerika Serikat.

Melengkapi edisi ini, kami juga menyajikan artikel ringan, mulai dari tip menjaga kesehatan mental, fenomena efek Dunning-Kruger di dunia kerja, hingga kisah bernuansa Ramadan dan Idulfitri. Tak lupa, kami hadirkan sosok di balik Mars Imigrasi sebagai bentuk apresiasi pada sejarah institusi.

Selamat membaca, Sahabat Mido!



cerita sampul

Transformasi 76 tahun Imigrasi Indonesia menghadirkan layanan modern yang makin sigap, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, Imigrasi menjaga gerbang kedaulatan negara di bandara, pelabuhan, dan perbatasan.

PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik
Ditjen Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri,

Arif Rahman Suryaman, Elyan Nadian Zahara,

Eka Safitri, Fipit Fatimah, Habil Ashari

I Made Donik Brahmedi Putra Ardika, Irdadika

Natasia Tiominar, Nabila Khansarani, Pandu

Suryo Wicaksono, Rendy Firnanda

Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Rahmad Nur

Iriyanto, Rizky Dikara Priatama, Immas Sari

Wijaya, Maria Rosalin Tambunan, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPLU

Gepzkii

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8,

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8,

Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumipura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Bakti Imigrasi untuk Negeri

LAPORAN UTAMA

8. Menekan Senjang di Pintu Negara: Dari Gerbang Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan

LIPUTAN KHUSUS

12. Mendekatkan Layanan, Memangkas Jarak
14. Menjemput Peluang Pulang

KEBIJAKAN

16. Sinergi Ditjen Imigrasi-Kemlu: Mudahkan Perekaman Paspur Dinas di Seluruh Indonesia

KERJA KITA

18. Imigrasi Bongkar Sindikat *Love Scamming* Internasional di Tangerang, 27 WNA Diamankan

20. Kompilasi Gakkum
24. Sinergi Imigrasi dan Masyarakat: Riwayat Izin Tinggal WN Singapura Diperiksa

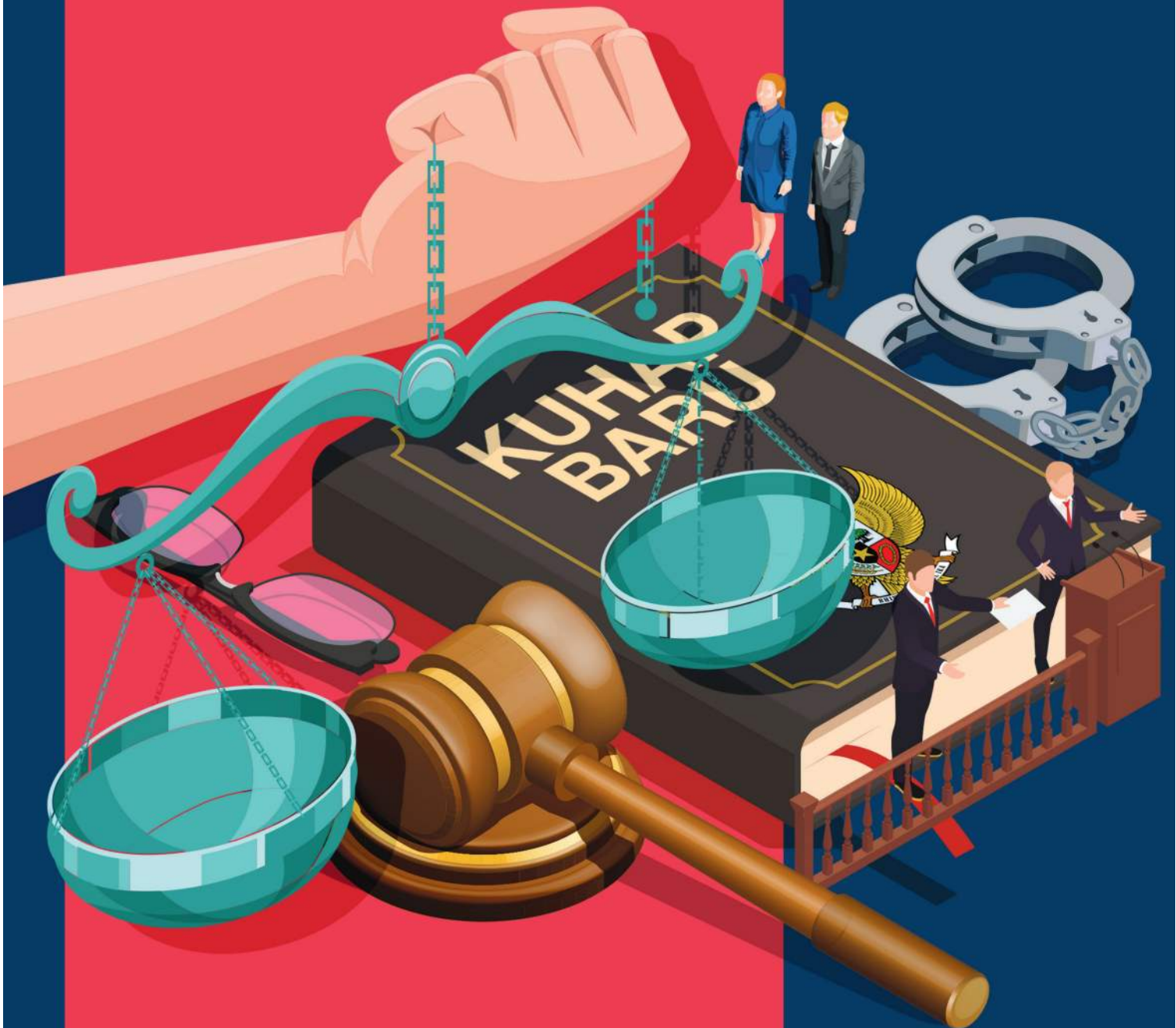
25. Terbukti Melakukan Penganiayaan, WN Selandia Baru Dideportasi Rudenim Denpasar

KILAS PERISTIWA

26. Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan Kemenimipras: Dorong Pemerataan Layanan Kantor Imigrasi dan Atase Imigrasi

28. PRIA 2026: Ditjen Imigrasi dan Imigrasi Jakarta Selatan Boyong 7 Trofi

38. NAPAS KUHAP BARU DI BALIK LOKET PASPOR: Menuju Paradigma Administratif-Investigatif



Your Journey Starts with a Click

Apply online from anywhere, arrive in Indonesia seamlessly

evisa.imigrasi.go.id



Your Indonesian visa needs are now at your fingertips.
Access the official portal at:
evisa.imigrasi.go.id



INDONESIAN IMMIGRATION
www.imigrasi.go.id



8

- 30. ULP Hadir di Mal Ciputra Seraya: Warga Pekanbaru Makin Mudah Mengurus Paspor
- 31. Kantor Imigrasi Surabaya Menjadi Proyek Percontohan Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas
- 32. Kompilasi Kilas Peristiwa

INFORMATIPS

- 34. Mengenal Perbedaan *Global Citizen of Indonesia* dan *Golden Visa* Indonesia
- 35. Lakukan Hal Ini Saat Permohonan Paspormu Dibatalkan

OPINI

- 36. Ketika Otot Keamanan Keram: Pelajaran Militerisasi ICE untuk Imigrasi Indonesia
- 38. Napas KUHAP Baru di Balik Loket Paspor: Menuju Paradigma Administratif-Investigatif

POJOKOMUNIKASI

- 40. Efek Dunning-Kruger dan Budaya Kerja Kita: Antara Gengsi, Senioritas, dan Ketakutan Dikritik
- 42. Latih Kesadaran: Menjaga Kewarasan pada Era Informasi

RENJANA

- 44. Liburan bagi Kota Perbatasan: Saat Luar Negeri Terasa Lebih Terjangkau

UMBIES EKSIS

- 46. Momen Ramadan Berkesan ala Petugas Imigrasi

INFOGRAFIK

- 48. Berkas Persyaratan Paspor
- 49. Persyaratan Paspor Anak

KABAR DARI SEBERANG

- 50. Kabar dari Negeri Hijaz

RESENSI

- 52. *Things Left Behind*: Mengasah Empati dan Profesionalisme melalui Kisah Kemanusiaan

53. MATA LENSA

54. KOMIK



37



44



28



BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Nggak Perlu Cuti Buat Paspor Sehari Jadi

Temukan titik terdekat **layanan percepatan paspor** pada akhir pekan di bawah ini.



Lokasi & Waktu Layanan

**Immigration Lounge
Kebayoran Park Mall
(Sabtu)**
Pukul 09.00–13.00

**Immigration Lounge
Mal Taman Anggrek
(Sabtu)**
Pukul 10.00–14.00

**Immigration Lounge
PIM 3 (Sabtu)**
Pukul 09.00–13.00

**Immigration Lounge
Grand Metropolitan
Bekasi (Sabtu)**
Pukul 10.00–14.00

**Immigration Lounge
Pesona Square Depok
(Sabtu)**
Pukul 10.00–15.00

**Immigration Lounge
PIK Avenue (Sabtu)**
Pukul 08.00–11.00

**Immigration Lounge
Solo Square**
Pukul 10.00–14.00

**UP3 Terminal 3
Soekarno-Hatta Airport**
Pukul 08.00–11.00

Dokumen Persyaratan

Pemohon dewasa:

- KTP, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah/buku nikah
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Pemohon anak di bawah umur:

- KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran/surat baptis
- Bukti menikah orang tua yang sah
- Paspor orang tua (pendamping)
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Ajukan permohonan paspormu
melalui aplikasi **M-Paspor**



Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram:

@kanimjaksel, @imigrasi_jakbar, @imigrasi_jakut,
@imigrasi.soekarnohatta, @imigrasibekasi, @imigrasi_depok,
@kanimsurakarta

MENEKAN SENJANG DI PINTU NEGARA: DARI GERBANG INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Akses listrik yang belum memadai mengilhami inisiasi penggunaan energi terbarukan oleh Ditjen Imigrasi untuk menenagai operasional perbatasan. Untuk akses yang setara, akses yang merata.

Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara



Di tapal batas Indonesia, listrik masih menjadi barang mewah. Tidak sedikit desa yang hanya mengandalkan genset dengan biaya tinggi atau bahkan sama sekali belum menikmati listrik sepanjang hidup mereka. Kondisi geografis yang penuh tantangan—hutan lebat, pegunungan terjal, dan aliran sungai besar—menjadikan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan biaya besar dan waktu panjang.

Kondisi serupa dialami oleh petugas imigrasi di pos-pos perbatasan di seluruh Indonesia. Meski masih memperoleh pasokan listrik, pemadaman merupakan fenomena sehari-hari yang harus dihadapi.

“Listrik di Entikong sering padam, dan itu mengganggu koneksi internet. Dampaknya, proses pemeriksaan keimigrasian jadi terhambat,” ujar Suryo yang sempat bertugas di Pos Lintas Batas



Kondisi PLB Krayan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Nunukan (Foto: Dok. Kanim Nunukan)



PLBN Sota di Merauke yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (Foto: Arif Rahman Suryaman)

SELAIN PENINGKATAN FASILITAS DAN PEMANFAATAN EBT, Penguatan Perbatasan juga dilakukan melalui pemutakhiran ekosistem pemeriksaan keimigrasian.

Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, pada 2024 lalu.

Hal ini diamini oleh Abid, petugas imigrasi yang pernah ditugaskan di Nunukan, Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dikenal memiliki potensi energi besar dari sumber daya alam (SDA) seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, ditambah potensi energi terbarukan seperti tenaga air dari sungai-sungai besar. Namun, ironisnya, hingga kini masih ada desa-desa yang belum menikmati aliran listrik. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara tahun 2025, tercatat sekitar 123 desa di perbatasan dan pedalaman yang belum teraliri listrik.

“Listrik di pos [imigrasi] alhamdulillah ada. Hanya saja pemadaman listrik yang tidak bisa diprediksi cukup menyulitkan, terutama ketika ada pemuangan [warga negara Indonesia/WNI] dalam jumlah besar dari Malaysia,” tutur Abid.

Kisah Suryo dan Abid mewakili gambaran medan juang petugas imigrasi yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Indonesia. Kondisi yang memprihatinkan ini melatarbelakangi dicanangkannya penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pada pos-pos imigrasi di daerah 3T sebagai

salah satu program kerja 2026 oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Panel surya dan biogas dipilih sebagai sumber energi alternatif yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di perbatasan.

“Harapannya, fasilitas di perbatasan ini juga setara [kualitasnya] dengan fasilitas di pintu-pintu utama perlintasan yang lain di kota-kota besar sehingga kami bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles, petugas di PLBN Sota.

Panel Surya dan Keberlanjutan

Secara nasional, percepatan energi bersih juga menjadi agenda strategis pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa kontribusi EBT dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran 14 persen pada 2024, sementara target Kebijakan Energi Nasional menetapkan angka 23 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber energi alternatif—termasuk tenaga surya—menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk wilayah terpencil dan perbatasan yang belum menikmati pasokan listrik secara stabil.

Arah kebijakan tersebut juga tecermin dalam Rencana Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menargetkan peningkatan signifikan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan dengan porsi besar dari tenaga surya dan tenaga air. Dalam perencanaan tersebut, pembangkit skala kecil berbasis panel surya dinilai paling adaptif untuk wilayah 3T karena tidak bergantung pada jaringan transmisi panjang dan dapat dioperasikan secara mandiri (*off-grid*) sehingga lebih efisien dibandingkan ketergantungan jangka panjang pada genset berbahan bakar fosil.

Sejalan dengan kerangka Kebijakan Energi Nasional, pemanfaatan energi terbarukan di titik-titik layanan negara juga dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan pengurangan emisi jangka panjang. Dengan demikian, penggunaan panel surya di pos perbatasan tidak hanya menjawab kebutuhan operasional, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan energi berkelanjutan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada 2026 adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah melalui Program Aksi Imigrasi. Hal ini mencakup penguatan layanan berbasis digital

dan modernisasi fasilitas di pintu gerbang negara.

“Tahun ini, kami berencana modernisasi sarana dan prasarana di berbagai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit *autogate* di sejumlah bandara, pelabuhan laut, PLBN, hingga peningkatan fasilitas pos lintas batas tradisional (PLBT). Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung *sustainable business process* dengan EBT melalui pemanfaatan panel surya di wilayah perbatasan dan 3T,” ujar Yuldi.

Dukungan Teknologi Modernisasi Layanan

Penggunaan EBT di daerah 3T bukanlah satu-satunya program kerja Ditjen Imigrasi. Imigrasi juga memantapkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem digital, sebagaimana dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1). Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi wadah penyelarasan strategi transformasi institusi guna meningkatkan standar layanan Imigrasi

dan mendukung prioritas nasional.

Selain peningkatan fasilitas dan pemanfaatan EBT, penguatan perbatasan juga dilakukan melalui pemutakhiran ekosistem pemeriksaan keimigrasian. Secara bertahap, implementasi *autogate* akan mencapai seluruh pintu masuk Indonesia. Dengan teknologi yang memudahkan pengawasan terhadap subjek dengan perhatian khusus (*Subject of Interest*), ekosistem ini menjadi salah satu ujung tombak imigrasi dalam menjaga negara dari ancaman kejahatan transnasional.

Selaras dengan penguatan perbatasan, Imigrasi juga menyederhanakan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor guna memperkuat perannya dalam mendukung iklim investasi Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan efektivitas sistem—yang terintegrasi dengan data perlintasan—diprojektikan memperluas peluang kedatangan warga negara asing (WNA) sekaligus menekan masuknya kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Reduksi kesenjangan proses bisnis Imigrasi tidak berhenti di pintu gerbang negara; tahun 2026 akan menjadi saksi kehadiran 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Jarak tempuh ma-

Penyebaran informasi terkait keimigrasian di Desa Binaan Kanim Madiun (Foto: Dok. Kanim Madiun)





Wamen Imipias Silmy Karim dalam pengarahan terkait pengembangan organisasi (Foto: Habil Ashari)

syarakat yang jauh akan terpangkas, sementara pengawasan keimigrasian makin tertata dalam jangkauan.

Perencanaan penambahan unit kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah. Prioritas diarahkan ke daerah dengan tingkat permohonan dokumen perjalanan yang tinggi, kawasan pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta kawasan dengan mobilitas orang asing yang meningkat.

“Permintaan layanan keimigrasian serta kebutuhan pengawasan orang asing di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, unit pelaksana teknis Imigrasi di sejumlah daerah masih menangani cakupan area yang sangat luas. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban layanan, jarak tempuh masyarakat yang jauh ke kantor imigrasi, serta keterbatasan jangkauan pengawasan di lapangan. Karena itu, penambahan kantor imigrasi dipandang sebagai langkah untuk menyeimbangkan antara beban kerja dan kapasitas layanan,” ungkap Yuldi Yusman.

Edukasi dan Pelindungan di Desa Binaan

Aspek penegakan hukum menjadi “sisi lain mata uang” yang tidak terpisahkan. Imigrasi berupaya menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) melalui penguatan program Desa Binaan yang melindungi masyarakat lewat edukasi.

Hingga September 2025, program ini telah diterapkan di 536 desa dengan 286 petugas imigrasi pembina desa (Pim-

pasa) yang aktif memberikan edukasi, sosialisasi, pendampingan pengurusan dokumen perjalanan yang sah, serta deteksi dini indikasi kejahatan lintas negara. Imigrasi juga berkolaborasi dengan Program Desa Migran Emas (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI) dan Pos Bantuan Hukum (Kementerian Hukum) guna memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir, memastikan warga mampu melindungi diri dan lingkungannya.

Setiap anggota masyarakat berhak meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. Namun, tidak semua orang siap menjalani proses yang benar. Keterbatasan informasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat—terutama di pedesaan dan wilayah terpencil—akan bahaya jeratan oknum tidak bertanggung jawab. Harapan palsu tentang kesejahteraan melalui jalur pintas membuat mereka yakin untuk mengaburkan identitasnya sendiri saat wawancara paspor di kantor imigrasi.

“Dalam rencana aksi Imigrasi 2026, pencegahan TPPO dan TPPM kami tempatkan sebagai upaya pelindungan masyarakat. Kami ingin hadir lebih dekat melalui edukasi, pendampingan, dan deteksi dini di desa-desa, agar warga tidak terjebak jalur berisiko. Keselamatan dan masa depan masyarakat adalah fokus utama setiap langkah keimigrasian,” tegas Yuldi Yusman.

Semangat Pertumbuhan di Tengah Dinamika

Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Silmy Karim

menyampaikan bahwa semangat Imigrasi adalah memperbesar organisasi sesuai tuntutan dinamika saat ini. “Berkat dukungan anggaran dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki keleluasaan untuk terus berkembang. Dari 114 kantor imigrasi pada 2023, sekarang sudah bertambah menjadi 151 pada 2025 ini. Selain untuk memberikan layanan dan pengawasan orang asing yang lebih baik, makin besarnya organisasi ini juga membuka peluang karier yang lebih luas bagi seluruh insan imigrasi,” jelas Silmy saat memberikan sambutan dan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026, Januari lalu.

Silmy juga berpesan kepada seluruh jajaran bahwa untuk memperkuat peran institusi, petugas imigrasi harus siap mengerahkan seluruh tenaga. Dirinya juga mengungkapkan harapan agar struktur organisasi saat ini—yang kantor wilayah berada langsung di bawah komando direktorat jenderal—dapat memberikan percepatan pada peningkatan kualitas pelayanan agar pelaksanaan tugas dan fungsi makin optimal. Dengan demikian, Imigrasi dapat menjadi organisasi terdepan yang menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lain.

“Kita sudah memulai dengan *All Indonesia*. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun, kita berproses dalam menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/ lembaga lain, [dan] sekarang sudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas imigrasi, jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tutupnya. ■

Petugas imigrasi dengan ramah mengarahkan pelintas untuk menggunakan *autogate* di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. (Foto: Habil Ashari)



MENDEKATKAN LAYANAN, MEMANGKAS JARAK

Pembentukan 18 kantor imigrasi baru menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan keimigrasian yang lebih merata dan responsif, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

■ Penulis: Rendy Firnanda

Bagi masyarakat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengurus paspor dulunya identik dengan perjalanan melelahkan sejauh 400 hingga 500 kilometer. Untuk mencapai kantor imigrasi (kanim) terdekat di Palu atau Banggai, mereka harus berkendara selama 10 hingga 14 jam dan sering kali menembus perjalanan malam yang dingin. Sesampainya di lokasi, perjuangan belum usai karena pemohon harus menginap selama tiga hingga empat hari untuk menunggu paspor selesai dicetak. Biaya transportasi, penginapan, dan waktu kerja yang

terbuang sering melebihi biaya pembuatan paspor itu sendiri.

Kurangnya akses layanan keimigrasian tidak hanya terbatas pada pengurusan paspor. Banyak pekerja asing di kawasan industri dan investasi di wilayah Morowali dan Morowali Utara juga kesulitan memperoleh layanan keimigrasian. Selain itu, petugas juga dihadapkan pada tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja yang luas dan sulit dijangkau.

Ini bukan hanya potret kondisi layanan keimigrasian di Morowali, melainkan cermin dari belum meratanya akses

keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia. Berangkat dari realitas tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengambil langkah membentuk 18 kantor imigrasi baru. Langkah ini bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan responsif, terutama di daerah dengan pertumbuhan investasi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Respons Strategis terhadap Tren Global

Kebijakan ekspansi ini menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Dengar

Menteri Imipias Agus Andrianto melakukan peletakan batu pertama Kantor Imigrasi Morowali. (Sumber: kemenimipias.go.id)





Yogyakarta International Airport di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kulon Progo (Sumber: yogyakarta-airport.co.id)

Pendapat (RDP) antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimipras) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (3/2). Menteri Imipras Agus Andrianto menjelaskan, penambahan kantor imigrasi serta atase imigrasi Indonesia di luar negeri merupakan respons atas meningkatnya volume permohonan visa, paspor, izin tinggal, serta aktivitas pengawasan orang asing.

“Permintaan layanan keimigrasian serta kebutuhan pengawasan orang asing di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di sejumlah daerah masih menangani cakupan area yang sangat luas,” ungkap Agus dalam rapat tersebut. Penambahan kantor imigrasi dapat menjadi langkah krusial untuk mencapai keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas layanan.

Perencanaan pembentukan unit kerja baru ini disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap wilayah. Fokusnya diberikan pada daerah dengan lonjakan permohonan dokumen perjalanan, kawasan yang berkembang secara ekonomi dan investasi, serta wilayah dengan peningkatan mobilitas warga negara asing (WNA).

Fokus Operasionalisasi di Daerah

Di lapangan, para kepala kanim (kanim) yang baru dilantik bergerak cepat memenuhi target 100 hari pertama. Di Morowali, Kakanim Kelas I TPI Morowali Yusva Aditya memastikan operasional segera berjalan untuk menjawab kebutuhan kawasan industri yang padat. Dengan bantuan 42 pegawai dari Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah serta Kanim Palu dan Banggai, Kanim Morowali telah menerbitkan paspor perdananya pada awal Februari lalu. Sebelumnya, Menteri Imipras Agus Andrianto telah melaksanakan peletakan batu pertama yang menandai

pembangunan Kanim Morowali pada Selasa (16/9/2025) silam.

Tidak hanya di Morowali, tantangan serupa dihadapi oleh Kakanim Kelas III Non-TPI Bone Andi Rezka Putra Arupalaka. Membangun kantor dari nol di Bumi Arung Palakka ini berarti menyiapkan sistem dan sumber daya manusia (SDM) sekaligus.

Meskipun kapasitas SDM masih terbatas, Rezka tetap berupaya mengoptimalkan layanan keimigrasian. Dengan dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Kanim Bone telah menerima tambahan enam personel sehingga saat ini pegawai berjumlah sembilan orang, termasuk kepala kantor. Kehadiran kantor ini mampu menghemat jarak tempuh sejauh 164 km bagi masyarakat di wilayah Bone, Soppeng, dan Sinjai yang sebelumnya harus melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan layanan keimigrasian.

Kebutuhan dari Keunikan Wilayah

Berbeda dengan Morowali yang didominasi industri atau Bone yang fokus pada paspor warga negara Indonesia (WNI), Kanim Tabanan di Bali memiliki karakteristik khusus. Kakanim Kelas II Tabanan Andikha Rahadiansyah menekankan pada keseimbangan antara pelayanan WNA dan pengawasan di pusat pariwisata. Dengan dukungan pemerintah Kabupaten Tabanan yang meminjamkan gedung eks-kantor camat, pelayanan keimigrasian di Gerbang Barat Pulau Dewata kini dapat terlaksana dengan lancar.

Sementara itu, di Yogyakarta, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kulon Progo telah resmi naik status menjadi Kanim Kelas II. Kantor ini menempati Gedung UKK yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan,

Kulon Progo. Pada minggu kedua Februari, Kanim Kulon Progo telah menerbitkan paspor perdananya. Kakanim Mohamad Wahyudiyantoro menjelaskan, “Alhamdulillah, kami telah berhasil menerbitkan paspor perdana. Saat ini kami juga masih fokus penataan struktur organisasi dan penyesuaian sistem agar layanan keimigrasian bisa berjalan dengan lancar.”

Sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta menjadi ruang berkumpulnya ribuan mahasiswa asing, akademisi, dan pegiat seni dari berbagai negara. Keunikan karakteristik wilayah ini menjadikan layanan izin tinggal studi, perpanjangan izin tinggal terbatas, serta pengawasan administratif terhadap mahasiswa asing dan pegiat seni sebagai fokus utama.

Sementara itu, wilayah Kulon Progo dan sekitarnya yang lebih banyak dihuni WNA memerlukan pengawasan izin tinggal yang lebih intensif. Hal ini mengingat keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA), proyek infrastruktur, serta meningkatnya penanaman modal asing (PMA) yang menuntut pengawasan cermat dan terintegrasi agar stabilitas serta iklim investasi di wilayah barat Daerah Istimewa Yogyakarta terjaga.

Membangun Akses dan Keadilan

Penguatan internal yang dibarengi sinergi pusat dan daerah menjadi benang merah dari pembentukan 18 kantor baru ini. Pemanfaatan gedung milik pemerintah daerah dan penugasan pegawai menjadi solusi agar masyarakat segera merasakan manfaat tanpa harus menunggu pembangunan gedung selesai.

Dengan mendekatkan layanan ke titik-titik pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat, negara hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pelayanan yang adil sekaligus memastikan pengawasan keimigrasian tetap berlangsung. ■



Kantor Sementara Kantor Imigrasi Morowali (Foto: Dok. Imigrasi Morowali)

MENJEMPUT PELUANG PULANG

Bagi banyak profesional Indonesia di luar negeri, keterikatan emosional dengan tanah air tak pernah benar-benar pudar. *Global Citizen of Indonesia* (GCI) membuka peluang bagi diaspora Indonesia, terlepas apa pun paspornya, untuk kembali ke Indonesia tanpa birokrasi rumit.

■ Penulis: Jimmy Asmoro

Pemberlakuan kebijakan *Global Citizen of Indonesia* (GCI) mulai menunjukkan buahnya dalam menarik talenta global dan diaspora. Dua sosok profesional, Dr. Karna Gendo dari Amerika Serikat (AS) dan Adam Welly Tedja dari Australia, menjadi dua individu pertama yang memanfaatkan fasilitas ini. Kehadiran mereka di terminal kedatangan internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta menandai arah baru kebijakan Imigrasi Indonesia.

Bagi diaspora yang telah puluhan tahun menetap di luar negeri, prosedur izin tinggal sering kali menjadi kendala utama saat ingin kembali ke tanah air.

Namun, melalui GCI, hambatan administratif tersebut mulai dipangkas untuk memberikan kepastian bagi mereka yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia.

Rekam Jejak Profesional dari Northwest

Dr. Karna Gendo membawa profil medis yang impresif. Ia meraih gelar dokter pada tahun 1995 di UC Davis dan menyelesaikan spesialisasi imunologi alergi serta penyakit dalam di University of Washington. Rekam jejaknya mencakup peran sebagai *clinical associate professor of medicine* serta dokter di Emergency Trauma Center, Harborview

Medical Center, Seattle—salah satu pusat penanganan trauma tersibuk di Amerika Serikat.

Meski kini telah menetap di Bay Area dan bergabung dengan Allergy and Asthma Group, keterikatan dengan Indonesia tidak pudar. Keputusannya menjadi warga negara AS pada 1984 adalah bagian dari perjalanan pendidikan dan karier profesionalnya di sana. Namun, bagi Gendo, faktor keluarga tetap menjadi alasan utama untuk tetap terhubung dengan Indonesia.

“Alasan utamanya adalah ikatan keluarga. Namun, keterbukaan Indonesia dan konektivitas digitalnya yang berkembang membuat saya yakin

Penyerahan kartu GCI oleh Menteri Imigrasi pada Hari Bakti Imigrasi Ke-76 (Foto: Arif Rahman Suryaman)





Potret Adam Welly Tedja, pemegang GCI (Foto: Arif Rahman Suryaman)

mendaftar program ini,” ujar Gendo. Baginya, kepastian hak tinggal jangka panjang tanpa beban birokrasi yang rumit memberikan ketenangan pikiran untuk fokus pada keluarga tanpa gangguan administratif tambahan.

Aspirasi dari Benua Kanguru

Narasi serupa datang dari Adam Welly Tedja, yang telah menetap di Australia selama 43 tahun. Berangkat sebagai pelajar pada 1983, Adam merupakan salah satu penerima manfaat dari eratnya hubungan pendidikan antara Indonesia dan Australia kala itu. Ia kemudian menjadi warga negara Australia pada medio 2003–2005.

Bagi Adam, GCI adalah kesempatan untuk kembali mengeksplorasi Indonesia secara mendalam. Setelah puluhan tahun di luar negeri, ia memiliki kerinduan untuk mengunjungi berbagai provinsi dan mempelajari kembali kekayaan budaya Nusantara. Namun, lebih dari sekadar kunjungan wisata, Adam melihat potensi besar pada talenta manusia di Indonesia yang ia sebut sebagai “raksasa tidur”.

“Saya melihat di Indonesia ada talenta-talenta yang belum terbangun. Saya berharap ada kesempatan untuk berbagi pengalaman dan membangkitkan potensi mereka agar Indonesia bisa masuk dalam jajaran negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi,” ungkap Adam.

Efisiensi Digital dan Kemudahan Akses

Satu titik temu yang menonjol dari pengalaman Gendo dan Adam adalah kepuasan terhadap transformasi digital di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Adam menceritakan bahwa proses pengajuan GCI dilakukan secara mandiri dan sangat singkat.

“Prosesnya sangat mulus. Hanya butuh waktu sekitar 60 sampai 90 menit.

Luar biasanya, tidak perlu sponsor atau agen; kita bisa kerjakan sendiri. Sistemnya sudah memenuhi standar dunia,” kata Adam. Ia merasa bangga dengan efisiensi yang ditunjukkan oleh otoritas Imigrasi saat ini.

Gendo pun sependapat. Menurutnya, proses digital yang transparan menunjukkan pemerintah menghargai waktu dan martabat para pemohon. Fasilitas ini ia ibaratkan sebagai kejelasan dan kepastian yang jauh lebih baik dibandingkan menggunakan visa reguler yang memiliki masa berlaku terbatas.

Bagi Adam, memiliki GCI terasa seperti memegang kunci rumah sendiri. “Kita bisa pulang kapan saja karena kuncinya sudah tersedia. Tidak usah repot lagi mengatur visa setiap kali ingin berkunjung,” tambahnya.

Kontribusi di Masa Depan

Implementasi GCI tidak hanya soal izin tinggal, tetapi juga potensi pertukaran pengetahuan. Meski saat ini fokus pada urusan domestik, Gendo membuka kemungkinan untuk menyalurkan keparannya di industri kesehatan Indonesia melalui skema berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Sebagai dokter berpengalaman di pusat layanan trauma, keahlian klinisnya tentu menjadi aset berharga.

Di sisi lain, Adam aktif mendorong rekan-rekan diasporanya, termasuk yang tergabung dalam Indonesian Diaspora Network, untuk segera memanfaatkan program ini. Ia menilai ini adalah momentum yang tepat bagi warga Indonesia di luar negeri untuk kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan tanah air tanpa tekanan kewajiban yang mendesak.

“Ini proses yang sangat menghargai pemohon dan fleksibel, memberikan kesempatan bagi kita yang di luar untuk

MELALUI GCI, HAMBATAN ADMINISTRATIF TERSEBUT MULAI DIPANGKAS UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN BAGI MEREKA YANG MEMILIKI KETERIKATAN KUAT DENGAN INDONESIA.

menjadi berkat kembali bagi negara Indonesia,” jelas Adam.

Menuju Pelayanan Publik yang Prima

Kehadiran Dr. Karna Gendo dan Adam Welly Tedja sebagai pemegang GCI pertama diharapkan menjadi pembuka jalan bagi para profesional kelas dunia lainnya. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma Imigrasi Indonesia dari yang sebelumnya sekadar penjaga gerbang, kini menjadi fasilitator pembangunan ekonomi dan jembatan bagi talenta global.

Dengan menekankan pada akses digital dan transparansi, Indonesia berusaha membangun citra sebagai negara yang kompetitif dalam menarik individu-individu berkualitas. Keberhasilan sistem ini dalam melayani para pionir, seperti Gendo dan Adam, memberikan sinyal positif bagi iklim investasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Transformasi digital yang dipuji oleh kedua narasumber ini merupakan langkah awal. Harapannya, standar pelayanan publik akan terus meningkat, menjadikan Indonesia rumah yang ramah bagi setiap talenta yang ingin membawa perubahan positif, terlepas dari paspor yang mereka kantongi. ■

Potret Dr. Karna Gendo, pemegang GCI (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Sinergi Ditjen Imigrasi-Kemlu: **MUDAHKAN PEREKAMAN PASPOR DINAS DI SELURUH INDONESIA**

Sejak Februari 2026, layanan perekaman data biometrik paspor dinas resmi diluncurkan di Kanim Surabaya dan kini telah tersedia di seluruh Indonesia. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus perekaman data.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terus berupaya mempermudah akses layanan dokumen perjalanan bagi seluruh warga negara, termasuk petugas publik yang menggunakan paspor dinas. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), melalui kebijakan terbaru, pemohon paspor dinas tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke pusat untuk perekaman data. Berikut ini petikan wawancara redaksi *BhumiPura* bersama Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Eko Budianto mengenai mekanisme dan latar belakang kebijakan tersebut.

Integrasi Layanan dan Payung Hukum

Apa pertimbangan utama di balik kerja sama layanan paspor dinas di kantor imigrasi (kanim) ini, mengingat sebelumnya proses ini merupakan domain eksklusif Kemlu?

Perlu diluruskan bahwa saat ini layanan paspor dinas di kanim masih berfokus pada tahapan pengambilan data biometrik. Langkah ini berawal dari kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen Protokol dan Konsuler pada Desember 2025 di Hotel Marriott, Jakarta. Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah

mengenai interoperabilitas data dalam rangka pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Selama ini, layanan paspor dinas dan diplomatik—khususnya dalam hal kemudahan akses pengambilan data—dirasakan belum optimal bagi para pemohon yang berada di daerah. Oleh karena itu, kolaborasi ini hadir sebagai solusi praktis. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kewenangan verifikasi dan penentuan status persetujuan paspor dinas tetap berada sepenuhnya di tangan pemerintah, dalam hal ini Kemlu.

Bagaimana pembagian peran di lapangan antara Ditjen Imigrasi dan Kemlu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan?

Pembagian peran saat ini sudah cukup jelas. Kanim berfungsi sebagai penyedia layanan pengambilan

data biometrik pemohon paspor dinas guna mendukung proses yang dilakukan oleh Kemlu. Salah satu pendorong utama kerja sama ini adalah penggunaan material polikarbonat pada paspor dinas saat ini yang menuntut perekaman data biometrik dengan akurasi tinggi.

Sebelumnya, kendala utama bagi pemohon paspor dinas adalah



Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Eko Budianto
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Pengambilan foto biometrik taruna Akademi Angkatan Laut di Kantor Imigrasi Surabaya untuk keperluan paspor dinas (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

keharusan datang langsung ke Jakarta untuk melakukan perekaman data biometrik. Dengan adanya kerja sama ini, Kemlu cukup terbantu karena beban pelayanan fisik di pusat berkurang, dan pemohon dari berbagai daerah dapat mendatangi kanim terdekat.

Progres Sinkronisasi dan Implementasi Sistem

Terkait infrastruktur teknologi, sejauh mana progres sinkronisasi data antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan portal milik Kemlu (AEPSILON)?

Interoperabilitas antara SIMKIM dan AEPSILON sudah berjalan dengan baik. Payung hukum yang mendasari pelaksanaan teknis ini adalah Keputusan Menteri Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi.

Mekanisme kerjanya adalah melalui integrasi aplikasi. Pemohon tetap memulai proses dengan mengajukan permohonan melalui aplikasi AEPSILON milik Kemlu. Setelah permohonan tersebut disetujui, AEPSILON akan

mengirimkan notifikasi secara otomatis ke SIMKIM. Notifikasi inilah yang menjadi dasar bagi petugas di kanim untuk melayani pengambilan data biometrik pemohon.

Setelah pengambilan data selesai di kanim, data tersebut tersimpan di SIMKIM dan dapat langsung ditarik oleh petugas Kemlu untuk proses pencetakan paspor. Penting untuk dicatat bahwa untuk saat ini, proses pencetakan fisik paspor dinas masih tetap dilakukan di Kemlu.

Apakah layanan ini sudah tersedia di seluruh Indonesia atau masih dalam tahap uji coba?

Meskipun awalnya terdapat kanim yang menjadi proyek percontohan, saat ini layanan pengambilan data biometrik paspor dinas sudah dapat dilakukan di seluruh kanim di Indonesia. Pelaksanaan pembukaan (*kick-off*) layanan pengambilan biometrik di Kantor Imigrasi Surabaya pada Kamis (19/2) dihadiri secara luar jaringan (*luring*) oleh direktur konsuler dan secara dalam jaringan (*daring*) oleh seluruh kanim sebagai bentuk sosialisasi internal. Sosialisasi telah dilakukan secara masif, baik kepada

KEMLU CUKUP TERBANTU KARENA BEBAN PELAYANAN FISIK DI PUSAT BERKURANG, DAN PEMOHON DARI BERBAGAI DAERAH DAPAT MENDATANGI KANIM TERDEKAT.

petugas di lapangan maupun instansi pemerintah di tingkat daerah agar mereka dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal.

Integrasi ini juga membawa manfaat tambahan dari sisi pengawasan. Karena data telah masuk ke SIMKIM, pemegang paspor dinas otomatis terintegrasi dengan data pencegahan dan penangkalan (*cekal*). Hal ini meningkatkan keamanan negara dan memastikan bahwa pemegang paspor dinas adalah individu yang tidak memiliki kendala hukum. Ke depannya, setiap pemegang paspor dinas juga dapat menggunakan fasilitas gerbang otomatis (*autogate*) saat melintasi perbatasan, baik di dalam maupun luar negeri.

Diharapkan, sinergi ini terus berkembang untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik, efisien, dan modern.

Apa harapan terhadap keberlanjutan program ini?

Harapannya, melalui interoperabilitas SIMKIM, akan tercipta standardisasi kualitas dan fitur pengamanan paspor dinas yang setara dengan paspor umum, sekaligus menutup celah keamanan melalui integrasi data pencegahan dan penangkalan yang lebih akurat. Sebagai instansi pemerintah, tentu Imigrasi berharap layanan yang diberikan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dari sisi layanan paspor dinas, hambatan geografis bagi pemohon di daerah diharapkan tidak lagi membebani mereka dari segi biaya dan waktu perjalanan ke pusat sehingga proses pelayanan menjadi jauh lebih efisien dan modern. Ke depannya, sosialisasi layanan ini harus terus digalakkan agar seluruh instansi pemerintah di daerah dapat mengoptimalkan pengambilan data biometrik di kanim terdekat sebagai bagian dari transformasi strategi layanan publik. ■

Para WNA terduga pelaku *love scamming* di wilayah BSD Gading Serpong (Foto: Tommy Ariyanto)



wasan Curug Tangerang, Gading Serpong dan mengamankan enam WN Tiongkok yang sempat melakukan perlawanan.

“Dua di antaranya telah *overstay* dan berupaya mengelabui petugas dengan menggunakan dokumen palsu,” ungkap Yuldi.

Pada 16 Januari, petugas mendatangi lokasi lain di wilayah Gading Serpong dan mengamankan empat WN Tiongkok yang menetap di lokasi tersebut. Penyelidikan mengungkap bahwa sindikat ini dikendalikan oleh jaringan lintas negara. Pendanaan diduga berasal dari seorang penyandang dana di Tiongkok berinisial ZH. Sementara itu, operasional harian di Indonesia dipimpin oleh ZK sebagai bos besar dengan pelaksana lapangan ZJ (alias Titi) serta pasangan suami istri CZ dan BZ.

IMIGRASI BONGKAR SINDIKAT *LOVE SCAMMING* INTERNASIONAL DI TANGERANG, 27 WNA Diamankan

Lebih dari seratus WNA diduga terlibat dalam sindikat kejahatan internasional. Sejumlah 27 di antaranya sudah diamankan, sedangkan ratusan lainnya dimasukkan ke daftar *Subject of Interest*.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 27 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam jaringan pemerasan daring bermodus *love scamming* di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa operasi ini bermula dari hasil pendalaman dan *profiling* terhadap sejumlah lokasi mencurigakan.

“Pada 8 Januari, tim Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) bergerak menuju lokasi pertama di wilayah Gading Serpong. Di sana, tim kami mengamankan 14 WNA yang terdiri atas 13 warga negara (WN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan satu WN Vietnam saat sedang melakukan aktivitas mencurigakan,” ujar Yuldi.

Di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa komputer dan telepon genggam

yang berserakan, serta dua paspor RRT atas inisial HJ dan ZR. Jaringan ini diketahui bekerja secara terorganisasi dengan menggunakan akal imitasi (*artificial intelligence*). Mereka mencari korban melalui media sosial, kemudian menjalin komunikasi agar percakapan terlihat menarik dan meyakinkan.

Selanjutnya, pelaku mengirimkan foto tidak senonoh untuk membujuk korban agar melakukan panggilan video (*video call*). “Saat itulah pelaku merekam aksi tersebut dan melakukan pemerasan (*blackmail*). Mereka mengancam akan menyebarkan rekaman jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang,” tambah Yuldi.

Dari Gading Serpong, tim melakukan pengembangan pemeriksaan ke beberapa titik lain. Pada 10 Januari di sebuah apartemen kawasan BSD, Tangerang Selatan, petugas mengamankan WN Tiongkok berinisial MX yang telah tinggal lajak (*overstay*) selama 137 hari. Pada hari yang sama, tim menyambangi ka-

Berdasarkan pengembangan yang dilakukan, terdapat 105 WN Tiongkok lain yang diduga berkaitan dengan jaringan kejahatan siber ini dan sudah dimasukkan ke daftar *Subject of Interest*. Dua orang di antaranya diamankan saat sedang melewati bandara. Mereka kini diperiksa terkait keterlibatan dengan jaringan kejahatan siber tersebut.

Hingga saat ini, petugas telah membawa 27 WNA tersebut ke Ditjen Imigrasi untuk menjalani detensi dan pemeriksaan intensif. Mereka terancam sanksi berat terkait pelanggaran izin tinggal serta indikasi tindak pidana kejahatan siber. Petugas juga masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota jaringan lain yang diduga masih bersembunyi di Indonesia. ■

Barang bukti yang diamankan oleh petugas imigrasi di dua rumah terduga pelaku kejahatan *love scamming* (Foto: Tommy Ariyanto)



Ade Rosyidin Soeratman

(Pencipta Mars Imigrasi)



Ade Rosyidin Soeratman lahir di Cirebon, 29 Juni 1955. Beliau menjadi pejabat dan tokoh Imigrasi dari Pendidikan Teknis Keimigrasian angkatan ke-V karena dorongan nuraninya untuk memberikan semangat dan menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas pengabdian keimigrasian Republik Indonesia. Mars Imigrasi diciptakan pada **26 Januari 1995** untuk dikumandangkan di setiap upacara resmi keimigrasian di kantor imigrasi di seluruh Indonesia dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

... mengabdikan dengan tulus dan suci untuk kejayaan Indonesia ...





Petugas menunjukkan bukti paspor WNA yang diduga melakukan pencurian di dalam pesawat. (Sumber: surabaya.imigrasi.go.id)

Imigrasi Surabaya Amankan Dua WN Tiongkok Terkait Dugaan Pencurian di Dalam Pesawat

Dua WN Tiongkok mencuri Rp5 juta dan 500 dolar AS dari tas penumpang Malaysia di pesawat Jakarta–Surabaya. Imigrasi Surabaya menindak tegas dengan rencana deportasi dan penangkalan meski korban sudah memaafkan.

Kantor Imigrasi Surabaya mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Tiongkok berinisial WM dan LJ. Keduanya diduga melakukan pencurian dalam pesawat pada rute Jakarta–Surabaya, Kamis (22/1).

Peristiwa terjadi di dalam pesawat Citilink QG716 sekitar pukul 11.15 WIB. Korban, seorang warga negara (WN) Malaysia, melaporkan kehilangan uang tunai sebesar Rp5 juta dan 500 dolar Amerika Serikat (AS) dari tas yang disimpan di bagasi kabin.

Berdasarkan keterangan petugas, dugaan pencurian muncul saat korban meninggalkan kursi untuk ke toilet. Awak kabin melaporkan melihat WM mengambil tas korban. Saat korban

kembali, tas ditemukan terbuka di dekat tersangka. Dalam pemeriksaan di pesawat, tersangka WM sempat melemparkan sejumlah uang ke arah kursi korban.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Agus Winarto menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan hasil sinergi antara Imigrasi, Angkasa Pura, Lanudal Juanda, Satgas Bandara, dan maskapai penerbangan.

“Kami berupaya menjaga ketertiban dan keamanan keimigrasian, termasuk dalam lingkungan transportasi udara. Setiap dugaan pelanggaran oleh WNA akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan meskipun perkara tersebut telah diselesaikan secara personal oleh pihak korban,” ujar Agus dalam konferensi pers, Selasa (4/2).

Meskipun korban telah memberikan maaf secara personal, pihak Imigrasi tetap melakukan pemeriksaan mendalam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa WM mengakui perbuatannya meski sempat berdalih salah mengambil tas. Mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WM dan LJ akan tetap dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Pihak Imigrasi memastikan kedua WN Tiongkok tersebut akan segera dideportasi ke negara asal dan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing kepada otoritas setempat. ■

Sumber: surabaya.imigrasi.go.id

Langgar Ketertiban Umum, Seorang WN Korea Selatan Pemegang ITAS Dideportasi

Seorang WN Korea Selatan dideportasi setelah terbukti melepas garis pembatas Satpol PP di Badung. Izin tinggalnya yang masih berlaku dua tahun ke depan dibatalkan.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi seorang warga negara (WN) Korea Selatan berinisial CHK (56). Pria pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) penyatuan keluarga ini dipulangkan secara paksa setelah terbukti melanggar peraturan daerah terkait ketertiban umum di wilayah Kabupaten Badung.

Tindakan administratif keimigrasian (TAK) ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Imigrasi Ngurah Rai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CHK terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat.

CHK mengaku telah melepas garis pita Satpol PP (Pol PP Line) di beberapa titik lahan yang sedang dalam status penghentian aktivitas oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Atas tindakan tersebut, CHK dinilai tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami tidak memberikan toleransi bagi orang asing yang tidak taat pada aturan. Deportasi ini adalah bentuk nyata penegakan hukum demi menjaga

ketertiban dan keamanan di Bali," tegas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko.

CHK dideportasi pada Senin (26/1) malam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan maskapai Jeju Air rute Denpasar-Incheon pukul 23.05 WITA. Selain dideportasi, ITAS milik CHK yang seharusnya berlaku hingga Agustus 2026 telah dibatalkan. Tidak hanya itu, namanya juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan.

Penangkapan dan penindakan ini berawal dari laporan proaktif Satpol PP Badung, yang kemudian direspons cepat oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai.

Winarko menambahkan bahwa Imigrasi Ngurah Rai akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Bali memberikan manfaat serta tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. "Kolaborasi dengan Satpol PP dan anggota TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) lainnya akan terus kami perkuat melalui pertukaran informasi maupun operasi gabungan," jelasnya. ■

Penulis: Harjisito Dani

WN Korea Selatan CHK dideportasi karena melepas garis satpol PP Badung. (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)



Imigrasi Cirebon deportasi 8 WN Tiongkok. (Foto: Dok. Kanim Cirebon)

8 WN Tiongkok Terancam Dideportasi

Sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat, delapan WN Tiongkok diamankan atas dugaan pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran ini menambah daftar deportasi Imigrasi Cirebon sepanjang 2025.

Kantor Imigrasi Cirebon mengamankan delapan warga negara (WN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Senin (26/1).

Penangkapan dilakukan setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan para warga negara asing (WNA) tersebut di sebuah lokasi usaha.

Kedelapan WNA yang diamankan masing-masing berinisial FZ (41), HL (64), JL (30), JJ (42), WY (53), YX (48), YL (47), dan KL (44). Hasil pemeriksaan menunjukkan para WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan *visa on arrival* (VoA), tetapi aktivitas keseharian mereka ditemukan tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang diberikan.

Atas perbuatan tersebut, kedelapan WNA tersebut kini ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Cirebon dan akan segera melakukan proses deportasi sesuai peraturan yang berlaku.

Tindakan ini menambah catatan pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut. Sepanjang 2025, Kantor Imigrasi Cirebon tercatat telah mendeportasi 28 WNA yang terbukti melanggar hukum keimigrasian. ■

Penulis: Dananto Wibowo

Terlibat Penipuan Internasional, 5 Orang WNA Diamankan Imigrasi Jakarta Pusat

Imigrasi Jakarta Pusat membongkar jaringan penipu Nigeria yang menjerat korban lewat *love scamming* dan modus kurir ekspedisi palsu. Dalam aksinya, pelaku meminta transfer uang hingga 500 dolar Amerika Serikat dari para korban.

Kantor Imigrasi Jakarta Pusat mengamankan 5 warga negara asing (WNA) asal Nigeria yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan daring internasional. Para pelaku ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1).

Kelima pria tersebut berinisial CA (29), JCA (38), CFN (23), CCO (22), dan CO (32). Selain terlibat dalam penipuan, mereka juga terbukti telah melanggar aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Daerah Khusus (DK) Jakarta Pamuji Raharja mengungkapkan bahwa para pelaku menjalankan modus *love scamming* melalui Facebook dan media sosial lainnya.

"Mereka merayu korban perempuan dari berbagai negara, seperti Sri Lanka,

Jamaika, India, hingga Amerika Serikat. Dari setiap korban, pelaku meraup sekitar 400 hingga 500 dolar Amerika Serikat (AS)," ujar Pamuji.

Selain *love scamming*, komplotan ini juga kerap menjalankan penipuan bermodus sebagai kurir ekspedisi internasional. Biasanya para pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp dan meminta transfer uang sebesar 250 sampai dengan 500 dolar AS dengan dalih biaya deposit untuk barang yang tertahan.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat M. Iqbal Ma'ruf menambahkan bahwa kelima WNA tersebut melakukan pelanggaran izin tinggal (*overstay*) dan tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan yang sah.

"Kami akan menerapkan sanksi tegas sesuai undang-undang. Saat ini penyidik masih melakukan pemerik-

saan lanjutan untuk mengembangkan kemungkinan adanya keterlibatan WNA lain," tegas Iqbal.

Akibat perbuatan mereka, kelima pelaku dijerat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian. Mereka terancam deportasi dan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan untuk kembali ke Indonesia.

Kantor Imigrasi Jakarta Pusat mengapresiasi laporan masyarakat yang menjadi kunci penangkapan ini. Partisipasi warga dinilai sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari aktivitas WNA yang mencurigakan.

Masyarakat yang menemukan aktivitas WNA yang melanggar aturan diimbau untuk segera melapor melalui saluran pengaduan resmi Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. ■

Penulis: Bismo Surono





Konferensi pers penangkapan WNA sindikat TPPM (Sumber: jakartabarat.imigrasi.go.id)

Imigrasi Jakarta Barat Ringkus 3 WNA Pemalsu Dokumen Kependudukan Indonesia

Imigrasi Jakarta Barat bongkar sindikat penyelundupan manusia yang memalsukan dokumen kependudukan Indonesia. Dokumen palsu itu dipasarkan sebagai “tiket” untuk migrasi ilegal ke Australia.

Kantor Imigrasi Jakarta Barat membongkar praktik dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) yang melibatkan jaringan internasional. Dalam operasi yang digelar pada Senin (12/1), petugas mengamankan dua warga negara (WN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial SS (37) dan XS (22) serta satu WN Thailand berinisial PK.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya warga asing yang memiliki identitas kependudukan Indonesia secara ilegal.

“Berdasarkan surat perintah tugas khusus, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga pelaku di sebuah penginapan di kawasan Jakarta Barat,” ujar Ronald.

Hasil pemeriksaan mengungkap fakta mengejutkan. Salah satu pelaku

kedapatan menggunakan identitas warga negara Indonesia (WNI) palsu. Lebih dari sekadar penggunaan pribadi, para pelaku diduga berperan mempromosikan jasa pemalsuan dokumen kependudukan Indonesia kepada WN RRT lainnya.

Dokumen palsu tersebut dipasarkan sebagai “tiket” pendukung untuk mempermudah keberangkatan secara ilegal menuju Australia dengan melalui Indonesia.

SS dan XS masuk ke Indonesia menggunakan *visa on arrival* (VoA), sedangkan PK menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK). Namun, aktivitas mereka di tanah air justru melenceng sebagai bagian dari sindikat penyelundupan manusia.

“Saat ini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor imigrasi untuk didalami tentang keterlibatan dalam jaringan TPPM internasional,” tutup Ronald. ■

Penulis: Denti Rahayu

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Buron Interpol

Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi WN Rumania yang masuk dalam daftar buron Interpol atas kasus pembunuhan. Pelaku diringkus setelah bersembunyi di Bali sejak November 2025.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Rumania berinisial CCZ pada Rabu (21/1) dini hari. CCZ merupakan subjek Red Notice Interpol yang menjadi buron atas kasus perampokan dan pembunuhan pada November 2023.

Deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan maskapai Qatar Airways dengan rute Denpasar–Doha, yang dilanjutkan menuju Bucharest, Rumania. Proses pengawalan dilakukan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Ngurah Rai bersama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Polda Bali.

Berdasarkan data perlintasan, CCZ memasuki wilayah Indonesia pada 14 November 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta dari Chengdu, Tiongkok. Keberadaannya terdeteksi di Jakarta dan Bali sejak November 2025.

Meskipun sempat tercatat melakukan pemesanan tiket pesawat dari Denpasar menuju Kuala Lumpur, data keimigrasian menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan ke luar Indonesia. Informasi tambahan dari NCB Bucharest melalui media sosial mengonfirmasi bahwa CCZ masih berada di Bali.

Setelah melakukan operasi gabungan selama tiga hari, Divhubinter Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali berhasil meringkus CCZ pada Kamis (15/1).

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko menegaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian (TAK) ini merupakan bentuk kerja sama antar lembaga dalam menjaga keamanan wilayah. Langkah deportasi ini mengakhiri peralihan CCZ di Indonesia untuk selanjutnya menjalani proses hukum atas kasus pembunuhan yang menjeratnya di Rumania. ■

Penulis: Harjisito Dani

Sinergi Imigrasi dan Masyarakat: **RIWAYAT IZIN TINGGAL WN SINGAPURA DIPERIKSA**

Berawal dari laporan warga, Imigrasi Jakarta mengusut aktivitas WN Singapura, TCL. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian adalah kerja bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melakukan pemeriksaan intensif terhadap TCL, warga negara (WN) Singapura. Langkah ini diambil tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) sebagai respons atas laporan masyarakat mengenai aktivitas yang bersangkutan selama berada di wilayah Indonesia pada periode sebelumnya.

“TCL masuk ke Indonesia pada 20 Januari menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) setelah sebelumnya menjadi pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) bekerja di 2025. TCL kami periksa atas riwayat kegiatan sebelumnya. Di catatan kami, dia pernah menduduki posisi direksi dan komisaris sebuah perusahaan swasta sejak 2016, serta aktif bekerja di dua perusahaan, PT RE dan PT BTI pada rentang waktu 2018 hingga 2019,” jelas Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Imigrasi DKJ Pamuji Raharja.

Proses pengawasan terhadap TCL telah dimulai sejak Juli 2025 setelah adanya laporan masyarakat. Pihak Imigrasi telah melayangkan tiga surat pemanggilan resmi untuk klarifikasi, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir secara personal. Kepala Bidang Wasdakim Kanwil Jakarta I Gusti Ibrahim mengonfirmasi kendala dalam proses pemeriksaan sebelumnya tersebut. “Sebelumnya yang hadir hanya kuasa hukum,” tegas Gusti.

Terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan, pihak Imigrasi masih melakukan verifikasi faktual dan pendalaman materiel. Gusti menjelaskan bahwa tim di lapangan sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum oleh TCL. “Semua masih kami dalam dan cocokkan dengan dokumen,” ujar Gusti.

Sebagai langkah awal dari hasil klarifikasi sementara, Kanwil Ditjen

Imigrasi DKJ telah menjatuhkan sanksi administratif berupa surat peringatan dan mewajibkan perusahaan penjamin TCL sebelumnya untuk secara berkala melaporkan setiap perubahan status keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika nantinya ditemukan bukti pelanggaran yang lebih berat, TCL terancam sanksi administratif keimigrasian yang mencakup pengenaan denda, penahanan (detensi), hingga pemulangan atau deportasi ke negara asal disertai penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia.

Pamuji Raharja menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban hukum dan kedaulatan negara. Ia memastikan bahwa setiap partisipasi masyarakat akan dikelola secara akuntabel oleh institusi.

“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan proporsional. Pengawasan keimigrasian merupakan kerja bersama yang membutuhkan sinergi antara Imigrasi dan masyarakat,” pungkas Pamuji. ■

Sumber: Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ

Pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian pekerja asing (ilustrasi) (Foto: Tommy Ariyanto)





Pengawalan AJM menuju Selandia Baru (Foto: Dok. Rudenim Denpasar)

Pihak Imigrasi langsung mengambil tindakan berupa pembatalan izin tinggal terbatas (ITAS) milik AJM yang masih berlaku hingga Juli 2026 dan memindahkan yang bersangkutan ke Rudenim Denpasar pada 17 September 2025. Dalam masa detensi di Rudenim Denpasar, AJM diketahui telah dilaporkan NLS ke Polres Badung pada Agustus 2025 dengan laporan tindak penganiayaan sehingga Polres Badung memohon penundaan deportasi AJM. Meskipun selama proses hukum sempat mencuat fakta bahwa AJM merupakan pengidap bipolar yang memerlukan penanganan khusus, prosedur hukum tetap bergulir hingga adanya putusan *inkracht* dari pengadilan pada 28 Januari 2026.

Dengan berakhirnya urusan pidana tersebut, Polres Badung merekomendasikan pendeportasian AJM kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali. Rudenim Denpasar menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan pendeportasian AJM melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Blenheim, Selandia Baru. Pendeportasian ini berdasarkan

Terbukti Melakukan Penganiayaan, **WN SELANDIA BARU DIDEPORTASI RUDENIM DENPASAR**

Tidak hanya deportasi, Imigrasi mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing Selandia Baru yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia.

■ Penulis: Reza Ashuri

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar merampungkan proses pemulangan paksa AJM (50), warga negara (WN) Selandia Baru, pada Jumat malam (30/1). Langkah deportasi ini dilakukan menyusul keluarnya vonis Pengadilan Negeri Denpasar yang secara resmi mencabut hambatan hukum atas AJM. Dalam putusan hakim, AJM terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan dijatuhkan hukuman 20 hari kurungan.

Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentalyadi menjelaskan, kasus yang

menjerat AJM bermula dari insiden di salah satu restoran di kawasan Ubud pada September 2025. Saat itu, AJM berselisih dengan karyawan restoran karena menolak membayar tagihan makanannya. AJM berdalih bahwa kartu ATM miliknya dibawa oleh sang kekasih, NLS, yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Perselisihan dengan karyawan restoran tersebut berujung pada aksi pemukulan kepada AJM oleh sejumlah orang di lokasi kejadian sebelum akhirnya situasi diredakan oleh personel Kepolisian dan Pecalang serta Kantor Imigrasi Denpasar.

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain mendeportasi, Rudenim Denpasar juga memasukkan nama AJM ke daftar penangkalan. Dengan demikian, AJM dilarang untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

"Mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga 10 tahun. Bahkan, penangkalan seumur hidup dapat dikenakan bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir terkait penangkalan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus," tutup Teguh. ■

Kebijakan penambahan kantor imigrasi di berbagai provinsi Indonesia dan atase imigrasi Indonesia di seluruh dunia menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas). Dalam rapat yang digelar pada Selasa (3/2) di Gedung DPR RI, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk merespons peningkatan volume permohonan visa, paspor, izin tinggal, serta aktivitas pengawasan orang asing. Jumlah kantor imigrasi dan atase imigrasi selama ini belum sebanding dengan peningkatan permohonan ini.

“Permintaan layanan keimigrasian serta kebutuhan pengawasan orang asing di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di sejumlah daerah masih menangani cakupan area yang sangat luas. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban layanan, jarak tempuh masyarakat yang jauh ke kantor imigrasi, serta keterbatasan jangkauan pengawasan di lapangan. Karena itu, penambahan kantor imigrasi dipandang sebagai langkah untuk menyeimbangkan antara beban kerja dan kapasitas layanan,” ungkapnya.

Rencana penambahan unit kerja dilakukan berbasis kebutuhan wilayah. Prioritas diarahkan ke daerah dengan tingkat permohonan dokumen perjalanan yang tinggi, kawasan pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta kawasan dengan mobilitas orang asing yang meningkat.

Senada dengan pernyataan Menteri Imipas, anggota DPR RI Komisi XIII Almuzzamil Yusuf mendukung penambahan kantor imigrasi. “Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah) yang meliputi Purwokerto mengalami pertumbuhan. Namun, belum ada kantor imigrasi. Yang ada [kantor imigrasi] di Cilacap. Saya berharap setelah ini Pak Direktur Jenderal (Dirjen) dapat menginisiasi pembangunan kantor imigrasi. Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati dan beliau sangat mendukung,” tuturnya.

Pada rapat tersebut juga didiskusikan penguatan fungsi keimigrasian di seluruh negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui penempatan atase imigrasi. Harapannya, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu klausul dalam revisi Undang-

Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan Kemenimipas: **DORONG PEMERATAAN LAYANAN KANTOR IMIGRASI DAN ATASE IMIGRASI**

Rapat Dengar Pendapat antara DPR RI dan Kemenimipas membahas kebijakan penambahan kantor imigrasi dan atase imigrasi di luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan layanan keimigrasian dan pengawasan orang asing di Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Undang (UU) Imigrasi berikutnya, yang akan dilaksanakan menyusul revisi UU KUHP dan KUHP.

Sugiat Santoso dari DPR RI Komisi XIII mengatakan, penting untuk menghadirkan atase imigrasi di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia karena dapat memberikan layanan yang responsif di bidangnya.

“Mengapa tidak semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dilengkapi dengan atase imigrasi? Padahal, dalam praktik hubungan antarnegara, fungsi imigrasi merupakan salah satu lini kerja paling awal dan mendasar. Jika aspek ini diperkuat secara menyeluruh, institusi keimigrasian Indonesia akan makin siap tampil se-

Menteri Imipas Agus Andrianto beserta jajaran dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)





Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Imipas (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

cara global dan memiliki jangkauan internasional yang lebih kuat,” ujar Sugiat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan dan masukan DPR sebagai bagian dari penguatan sistem keimigrasian. “Penambahan kantor dan penguatan atase imigrasi adalah upaya untuk memastikan layanan makin merata, responsif, dan berdaya jangkau global, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian,” ujarnya.

Inisiasi Revisi UU Keimigrasian

Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula wacana untuk mendorong harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keimigrasian, serta penyusunan naskah akademik perubahan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar selaras dengan KUHP yang baru. Langkah harmonisasi regulasi dan prosedur ini dilakukan agar seluruh aturan internal serta prosedur operasional standar (POS) penyidikan maupun penindakan di lapangan sejalan dengan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dan pendekatan berbasis risiko (*risk*

approach). Di samping itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga melakukan sosialisasi nasional implementasi KUHP dan KUHP kepada seluruh UPT keimigrasian di Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto memaparkan bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar transformasi sebagai respons langsung atas berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang membawa reformasi fundamental dalam sistem pidana nasional.

Dalam paparannya, Agus menjabarkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) tahun 2026 diarahkan untuk mencapai dua sasaran strategis, yakni peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan serta tata kelola yang berintegritas. Perubahan paradigma dari pendekatan pemenjaraan menuju pidana non-pemenjaraan menuntut fungsi keimigrasian untuk menyesuaikan norma pidana dan sanksi, terutama dengan mengedepankan pidana denda sebagai alternatif.

“Perubahan ini menuntut agar penegakan hukum keimigrasian tetap

efektif, proporsional, dan berkeadilan, selaras dengan dinamika hukum nasional dan global. Kita mendorong transformasi pendekatan dari yang semula dominan represif menjadi lebih preventif, strategis, dan berbasis risiko,” ujar Agus di hadapan anggota legislatif.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga memprioritaskan penguatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi nasional ke seluruh UPT dan penguatan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TP). Agus menegaskan bahwa penguatan fungsi intelijen dan koordinasi intensif lintas aparat penegak hukum merupakan kunci utama. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan baru ini tetap solid dan mampu menjaga kedaulatan negara melalui sistem yang lebih modern dan manusiawi.

“Harmonisasi regulasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan kepastian hukum di tengah transisi paradigma pidana nasional. Kami berkomitmen menyelaraskan seluruh prosedur keimigrasian agar lebih akurat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika global saat ini,” tutup Agus. ■

PRIA 2026: DITJEN IMIGRASI DAN IMIGRASI JAKARTA SELATAN BOYONG 7 TROFI

Sebelas kategori diperlombakan dalam PRIA 2026, termasuk *Owned Media* dan Kanal Digital. Ditjen Imigrasi dan Imigrasi Jakarta Selatan memboyong total tujuh trofi pada ajang kehormatan tingkat nasional ini.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Wajah Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sandi Andaryadi tampak berseri-seri saat memenuhi panggilan juri untuk menerima trofi pada malam puncak Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026. Acara yang berlangsung di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, pada Jumat (13/2) itu menjadi ajang keberhasilan bagi Ditjen Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Keduanya berhasil meraih total tujuh trofi untuk kategori kementerian/lembaga.

Imigrasi Jakarta Selatan menyabet trofi perak dan perunggu untuk kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial. Sementara itu, Ditjen Imigrasi membawa pulang tiga trofi emas, satu trofi perak, dan satu trofi perunggu.

"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi luar biasa ini. Alhamdulillah, kami berhasil membawa pulang tiga *gold*

medal untuk kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial (TikTok) dan subkategori *Website* serta kategori *Owned Media* subkategori Majalah Internal untuk majalah keimigrasian *BhumiPura*; *silver medal* untuk kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial (Instagram); dan *bronze medal* untuk kategori Program PR subkategori *Government PR*," ujar Sandi.

PRIA merupakan ajang kompetisi bergengsi yang menilai kinerja kehumasan atau *public relations* (PR) di berbagai instansi dan perusahaan, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta nasional dan multinasional, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi.

Tahun 2026 menandai penyelenggaraan PRIA yang ke-11. Dalam kompetisi kali ini, sejumlah kategori yang dibuka meliputi *Owned Media*, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan,

Program PR, Departemen PR, hingga Komunikasi SR. Untuk menilai seluruh karya peserta, panitia menerjunkan 18 juri kaliber nasional yang kompeten di bidang masing-masing.

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku tuan rumah penyelenggaraan tahunan ini menegaskan bahwa PRIA 2026 merupakan ruang eksplorasi krusial bagi standar profesionalisme komunikasi di tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi saat membuka malam puncak PRIA 2026. Aria hadir mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Dalam sambutannya, Aria menilai tema "Merajut Narasi dan Menguatkan Reputasi untuk Negeri" sangat relevan dengan lanskap komunikasi masa kini. Ia menyoroti bahwa masyarakat saat ini hidup dalam era ekonomi perhatian (*attention economy*), yaitu ketika perhatian publik telah menjadi komoditas yang paling berharga sekaligus mahal.

"Saat ini, informasi melimpah, tetapi kepercayaan justru makin langka. Dalam situasi seperti ini, fungsi *public relations* tidak boleh lagi sekadar bersifat administratif," tegas Aria. Ia menekankan bahwa peran humas kini harus bergeser ke ranah strategis karena menjadi penentu keberlanjutan sebuah organisasi. Pengelolaan isu tidak lagi dapat mengandalkan intuisi semata, tetapi harus dilakukan secara proaktif dengan strategi komunikasi berbasis data.

"Narasi harus dirancang melalui *social listening* dan *sentiment analysis* agar pesan yang disampaikan tepat sasaran," lanjutnya.

Lebih lanjut, Aria mendorong praktisi humas untuk memanfaatkan wawasan perilaku (*behavioral insight*) dan pemetaan perjalanan audiens (*audience journey mapping*). Menurutnya, praktik komunikasi telah bergerak ke spektrum yang jauh lebih luas dan mendalam, yang mencakup perubahan fundamental, yaitu dari hubungan media (*media relations*) menjadi keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*); dari publikasi menjadi manajemen reputasi dengan fokus pada pembangunan dan penjagaan reputasi jangka panjang; dan dari respons krisis (*crisis response*) menjadi manajemen isu proaktif (*proactive issue management*), yaitu bergeser dari sekadar merespons krisis menjadi pengelolaan isu secara proaktif sebelum berkembang menjadi masalah besar. ■



Sekretaris Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi menerima penghargaan yang diraih oleh Ditjen Imigrasi pada PRIA 2026 di Yogyakarta. (Foto: Arif Panman Suryaman)

Immigration Lounge

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3**, Lantai B2
- **Mall Taman Anggrek**, Lantai LG
- **Senayan City**, Lantai 6

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall Bekasi**,
Lantai 4
- **Pesona Square Mall Depok**,
Lantai 3

Jawa Tengah

- **Solo Square Mall**, Lantai 1

D.I. Yogyakarta

- **Sleman City Hall (SCH)**, Lantai 2

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik**, Lantai 2F
- **Ciputra World Mall Surabaya**,
Lantai 4

Biaya

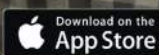
- Paspor elektronik
masa berlaku 5 tahun
Rp650.000
- Paspor elektronik
masa berlaku 10 tahun
Rp950.000
- Percepatan paspor
Rp1.000.000

Ajukan permohonan paspor & daftar

melalui **Aplikasi M-Paspor**



Pindai kode QR untuk unduh



ULP Hadir di Mal Ciputra Seraya: **WARGA PEKANBARU MAKIN MUDAH MENGURUS PASPOR**



Penyerahan plaket dari Kanwil Ditjen Imigrasi Riau kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar pada peresmian ULP di Mal Ciputra Seraya (Foto: Dok. Kanim Pekanbaru)

Kantor Imigrasi Pekanbaru membuka unit layanan paspor atau ULP di Mal Ciputra Seraya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat. Layanan ini beroperasi setiap hari (Senin-Minggu) dan berkuota 50 permohonan per harinya.

■ Penulis: Lukman Supriadi

Masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya kini bisa mengurus paspor di unit layanan paspor (ULP) yang terletak di lantai 1 Mal Ciputra Seraya. ULP ini resmi beroperasi pada Senin (26/1), bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke-76.

Peresmian ULP Mal Ciputra Seraya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru

Markarius Anwar, perwakilan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Riau, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Komandan Distrik Militer 0301/Pekanbaru, dan Kepala Rumah

Detensi Imigrasi (Rudenim). ULP ini adalah unit layanan ketiga dari Kantor Imigrasi Pekanbaru.

ULP Mal Ciputra Seraya beroperasi dengan 50 kuota per hari untuk permohonan baru dan penggantian paspor. Masyarakat yang akan mengurus paspor bisa datang langsung setelah memilih jadwal kedatangan melalui aplikasi M-Paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru Ryang Yang Satiawan menjelaskan bahwa pendirian ULP ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat. "Saat masyarakat mengurus paspor, lahan parkir adalah salah satu yang dicari. Dengan adanya layanan paspor di mal ini, kami berharap bisa memberikan opsi lain yang lebih nyaman untuk masyarakat. Terlebih ULP Mal Ciputra Seraya buka setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu," jelasnya.

Lebih lanjut, Ryang memaparkan bahwa dengan beroperasinya ULP Mal Ciputra Seraya, Imigrasi Pekanbaru bisa menerbitkan rata-rata 300 paspor setiap harinya. Langkah ini sekaligus mengurai kepadatan layanan di kantor imigrasi utama Jalan Teratai No. 8, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

"Masyarakat Pekanbaru sekarang bisa memilih, mau mengurus paspor di kantor imigrasi, di Mal Pelayanan Publik, atau di ULP Mal Ciputra Seraya," tambah Ryang. Ia juga berpesan bahwa pemohon tetap harus mengurus ke Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk penggantian paspor yang hilang atau rusak.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi inovasi layanan keimigrasian ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendekati diri dengan warga. Menurutnya, fasilitas parkir mal yang luas menjadi nilai tambah signifikan bagi kenyamanan masyarakat.

"Inovasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pekanbaru agar lebih cepat dan nyaman," pungkas Markarius. ■

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya ditunjuk sebagai lokasi proyek percontohan (*pilot project*) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) bersama Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini diambil untuk mengintegrasikan data pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi aparaturnegara di tingkat daerah.

Kerjasama lintas kementerian ini bertujuan untuk mengatasi hambatan teknis yang selama ini dialami pemegang paspor dinas, seperti data biometrik yang belum terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta kendala pembacaan sistem pada gerbang otomatis (*autogate*) di bandara internasional.



KANTOR IMIGRASI SURABAYA MENJADI PROYEK PERCONTOHAN PENGAMBILAN DATA BIOMETRIK PASPOR DINAS

Lebih dari 1.200 pemohon paspor dinas dari daerah tak perlu lagi ke Jakarta untuk pengambilan data biometrik. Kini, Kantor Imigrasi Surabaya menjadi proyek percontohan layanan yang akan diperluas ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

■ Penulis: Candra Kristyanto

Melalui sinkronisasi ini, pejabat negara kini dapat melakukan proses pengambilan biometrik di kantor imigrasi setempat tanpa terpusat ke Jakarta.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi atas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas. "Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami," ujar Eko.

Transformasi menuju paspor dinas elektronik juga dinilai krusial untuk mendukung tugas diplomatik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Konsuler

Kemlu Akio Tamala. Berdasarkan data Kemlu, terdapat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahunnya, dengan lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Keberadaan paspor elektronik menjadi syarat mutlak bagi sejumlah negara mitra untuk memberikan fasilitas bebas visa.

Dalam pelaksanaan proyek percontohan di Surabaya, pengambilan data biometrik dilakukan secara simbolis kepada empat taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara bersamaan, layanan serupa juga diimplementasikan pada 90 taruna AAL lainnya sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan.

Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang telah

dilakukan di Kantor Imigrasi Surakarta pada November tahun lalu. Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi aparaturnegara di berbagai wilayah.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menegaskan bahwa penunjukan Kantor Imigrasi Surabaya sebagai lokasi proyek percontohan merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi jajarannya. "Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi *pilot project* menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya," tutup Novianto. ■

Peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke-76: Aksi Nyata untuk Masyarakat dan Lingkungan

Peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) Ke-76 tahun ini terasa lebih hangat dan dekat dengan masyarakat. Beragam rangkaian kegiatan yang digelar merefleksikan peran Imigrasi yang tidak hanya menjadi penjaga gerbang negara, tetapi juga berkontribusi dalam kemanusiaan dan lingkungan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) memperingati Hari Bakti Imigrasi (HBI) Ke-76 dengan rangkaian aksi kemanusiaan dan lingkungan di Auditorium Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekin) Tangerang pada Selasa (20/1).

Dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto, acara yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Wali Kota Tangerang ini mengusung semangat kesederhanaan dengan tetap memberikan dampak bagi warga sekitar.

“Kami ingin memastikan bahwa pada usia ke-76 ini, kehadiran Imigrasi dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski perayaan hanya digelar sederhana, manfaatnya bagi warga harus luar biasa,”

jelas Agus dalam sambutannya.

Dalam agenda tersebut, Agus menyerahkan secara simbolis 20.000 bibit pohon kelapa genjah hibrida kepada pemerintah Kota Tangerang.

“Dengan menanam pohon, kita sedang menanam masa depan. Saya ingin Imigrasi tidak hanya dikenal sebagai penjaga gerbang negara, tetapi juga institusi yang berkontribusi pada kesehatan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” tambah Agus.

Selain bantuan bibit, Kemenimipas menyalurkan 5.000 paket sembako kepada kelompok rentan, termasuk warga terdampak banjir, Desa Binaan, serta sejumlah pondok pesantren di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang, Soekarno-Hatta, Serang, dan Cilegon.

Aksi kemanusiaan lain yang digelar adalah kegiatan donor darah yang

melibatkan lebih dari 500 pegawai dan masyarakat umum, dengan target 400 kantong darah untuk mendukung stok medis darurat PMI.

Di penghujung acara, Menteri Agus secara mendadak meminta tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang untuk memfasilitasi tes urine di lokasi.

Sasaran tes ini adalah seluruh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kemenimipas yang hadir. Agus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di internal kementeriannya.

Rangkaian peringatan ditutup dengan penanaman bibit kelapa pertama di area kampus Poltekin oleh Agus bersama pimpinan daerah sebagai simbol dimulainya pengabdian yang berkelanjutan. ■

Penulis: Udik Fajar



Menteri Imipas Agus Andrianto menanam bibit kelapa genjah hibrida sebagai simbol keberlanjutan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi Ke-76. (Foto: Dok. Pusdatin Kemenimipas)

Layanan Paspur Percepatan Kini Hadir di Sleman City Hall

Menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan efisien, Kantor Imigrasi Yogyakarta meluncurkan inovasi baru. Uji coba layanan paspor percepatan kini dapat diakses langsung di Sleman City Hall.

Kantor Imigrasi (Kanim) Yogyakarta membuka uji coba layanan paspor percepatan di Immigration Lounge Sleman City Hall (SCH) pada Senin (19/1). Pada tahap awal, layanan ini tersedia dengan kuota 10 pemohon per hari melalui sistem *walk-in* atau datang langsung tanpa pendaftaran daring. Jam operasional dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan waktu buka pusat perbelanjaan.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Yogyakarta Tedy Riyandi menyatakan bahwa inovasi ini menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih luas.

"Immigration Lounge ini [merupakan] upaya kami [dalam] memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengurus paspor. Kami berharap masyarakat bisa lebih nyaman dari sisi lokasi dan pelayanan," ujar Tedy.

Tidak hanya itu, Immigration Lounge SCH dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya ruang tunggu dengan *snack corner*, mesin kopi, dan kursi pijat. Selain itu, ada juga Sistem Antar Paspur, yakni petugas menyerahkan dokumen langsung ke pemohon di ruang tunggu setelah proses selesai.

Pada hari pertama peluncuran, tercatat tujuh pemohon terlayani. Salah

seorang pemohon, Asri Rahmadita, menilai kehadiran layanan ini sangat praktis bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu. Menurutnya, proses di Immigration Lounge jelas dan tidak memakan waktu lama.

Melalui *soft launching* ini, Kanim Yogyakarta berharap dapat terus memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. ■

Penulis: Hyacintha Purwitasari



KDEI Taipei Luncurkan Sistem Pembayaran Digital untuk Layanan Paspur

Kenaikan jumlah WNI di Taiwan mendorong KDEI Taipei melakukan terobosan pelayanan. Melalui sistem pembayaran digital untuk layanan paspor, pemohon paspor dapat melakukan transaksi secara lebih fleksibel dan praktis.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei meluncurkan sistem pembayaran digital untuk layanan paspor, bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Imigrasi pada Senin (26/1). Inovasi ini hadir sebagai respons atas lonjakan jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan yang kini mendekati angka 400.000 jiwa.

Melalui sistem baru ini, mekanisme pembayaran yang sebelumnya tersentralisasi di Chang Hwa Bank kini diperluas. Pemohon paspor bisa melakukan transaksi di berbagai minimarket di seluruh penjuru Taiwan, seperti 7-Eleven, FamilyMart, dan Hi-Life.

Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo menjelaskan bahwa tren kedatangan WNI ke Taiwan terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, kenaikannya tercatat hampir 70%. Saat ini, KDEI Taipei melayani rata-rata 300 hingga 400 permohonan setiap harinya, baik untuk pembuatan paspor maupun layanan endorsement.

"Jumlah WNI yang terus meningkat setiap tahunnya mewajibkan KDEI Taipei untuk terus berinovasi agar pelaya-

nyan tetap terjaga dengan baik, makin cepat, dan efisien," ujar Arif dalam sambutannya di Taipei.

Digitalisasi ini merupakan kelanjutan dari transformasi layanan KDEI, yang sebelumnya meluncurkan Sistem Endorsement V3 bagi pekerja migran Indonesia (PMI) pada awal 2025.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Imigrasi KDEI Taipei Wahyu Wibisono menekankan bahwa integrasi sistem pembayaran digital ini merupakan langkah krusial untuk mengurai antrean dan mempermudah akses layanan bagi WNI yang tersebar di berbagai wilayah Taiwan.

"Sistem pembayaran digital ini adalah upaya untuk menjawab tantangan geografis dan mobilitas WNI di Taiwan. Kini, mereka tidak perlu terpaku pada jam operasional bank tertentu. Layanan pembayaran sudah tersedia di ujung jari dan melalui jaringan minimarket terdekat," ujar Wahyu.

Selain peluncuran sistem digital, peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke-76 bertajuk "Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju" ini juga ditandai dengan sebuah peresmian wajah baru kantor layanan di lantai 2 KDEI Taipei. Rehabilitasi fasilitas fisik ini dilakukan untuk meningkatkan standar kenyamanan bagi para pemohon yang datang langsung ke kantor layanan. ■

Penulis: Wahyu Wibisono



MENGENAL PERBEDAAN GLOBAL CITIZEN OF INDONESIA DAN GOLDEN VISA INDONESIA

Izin tinggal permanen Indonesia bisa didapatkan tanpa investasi miliaran rupiah. Program GCI membuka jalan bagi diaspora dan eks-WNI untuk pulang dengan syarat penghasilan mulai dari 15.000 dolar AS per tahun.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri



Perbedaan Global Citizen of Indonesia dan golden visa (ilustrasi) (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menerbitkan kebijakan *Global Citizen of Indonesia* (GCI) yang menawarkan izin tinggal tanpa batas masa berlaku pada Januari 2026. Sekilas, kebijakan ini mirip dengan *golden visa* Indonesia yang telah diimplementasikan sejak 2024. Namun, kedua program visa tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme dan subjek.

"*Global Citizen of Indonesia* disiapkan sebagai jalur bagi diaspora, eks-WNI (warga negara Indonesia), dan keluarganya yang ingin kembali menetap dan berkontribusi di Indonesia. Sementara itu, *golden visa* dirancang untuk menarik investor dan talenta global yang memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Dari segi skema pemberian izin tinggal, keduanya juga berbeda. *Golden visa* diberikan hingga 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan GCI

langsung berlaku selamanya. Pemegang cukup lapor diri setiap lima tahun," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Dalam skema GCI, pemohon dapat memperoleh izin tinggal dengan jaminan keimigrasian berupa komitmen investasi yang lebih ringan dibandingkan dengan *golden visa* pada instrumen seperti obligasi, saham, reksa dana, deposito, atau kepemilikan properti. Syarat lainnya adalah bukti penghasilan minimum sekitar 1.500 dolar Amerika Serikat (AS) per bulan atau 15.000 dolar AS per tahun.

"Pemohon GCI dari jalur keahlian khusus tidak perlu [memberikan] bukti komitmen investasi. Cukup bukti pendapatan dan surat undangan yang disertai penjaminan dari pemerintah pusat. Kami sangat *welcome* kepada diaspora yang dinilai memiliki keahlian strategis bagi pembangunan nasional.

Artinya, nilai utama GCI bukan semata dana, tetapi juga keterampilan emosional, sosial, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)," tambah Yuldi.

Berbeda dengan GCI, *golden visa* adalah visa yang diberikan kepada orang asing berkualifikasi tertentu untuk tinggal di Indonesia selama lima atau sepuluh tahun dengan masa berlaku yang dapat diperpanjang. Kebijakan ini menekankan dukungan terhadap perekonomian nasional.

Yuldi menjelaskan, untuk dapat tinggal di Indonesia selama lima tahun, investor perorangan asing yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar 2.500.000 dolar AS. Untuk masa tinggal sepuluh tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah 5.000.000 dolar AS.

Sementara itu, bagi direksi, komisaris, atau perwakilan korporasi induk yang membentuk perusahaan di Indonesia dan mengajukan *golden visa* dengan masa tinggal lima tahun, nilai investasi yang diperlukan sebesar 25.000.000 dolar AS. Untuk masa tinggal sepuluh tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar 50.000.000 dolar AS.

Ketentuan berbeda berlaku bagi investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk *golden visa* lima tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai 350.000 dolar AS untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik, atau penempatan tabungan/deposito. Untuk *golden visa* sepuluh tahun, dana yang harus ditempatkan adalah sebesar 700.000 dolar AS.

"Melalui GCI, pemerintah terus berupaya memulihkan ikatan warga dunia yang memiliki darah Indonesia atau terhubung dengan tanah air, sekaligus membuka ruang kontribusi nonfinansial seperti keahlian, jaringan internasional, dan kolaborasi pengetahuan," tutup Yuldi. ■

LAKUKAN HAL INI SAAT PERMOHONAN PASPORMU DIBATALKAN

Biaya paspor yang sudah dibayarkan tidak otomatis bisa dikembalikan. Pengecualian hanya berlaku jika layanan batal karena kesalahan sistem, bukan kelalaian pemohon.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Bagi masyarakat yang akan mengajukan paspor, memahami prosedur serta ketentuan biaya layanan menjadi hal yang penting. Tidak sedikit pemohon yang masih bertanya-tanya, bagaimana jika permohonan paspor tidak dapat dilanjutkan setelah proses wawancara? Apakah biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan? Penjelasan mengenai hal ini perlu dipahami secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, khususnya Pasal 63, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Berdasarkan peraturan tersebut, pengembalian PNBP dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagai berikut.

- Terjadi kesalahan pembayaran (misalnya kelebihan bayar).
- Layanan tidak jadi diberikan bukan karena kesalahan atau kelalaian pemohon.
- Terdapat putusan atau kebijakan resmi yang menyatakan pembayaran tersebut harus dikembalikan.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Achmad Nur Saleh menjelaskan bahwa dalam konteks layanan paspor, proses pelayanan tidak hanya dinilai dari terbit atau tidaknya paspor.

"Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Pasal 1, PNBP dikenakan pada layanan keimigrasian. Pelayanan paspor meliputi seluruh proses sejak pemohon mendaftarkan permohonannya di aplikasi M-Paspor hingga mendapatkan pelayanan di kantor imigrasi," jelasnya.

Artinya, ketika proses layanan sudah

berjalan (mulai dari verifikasi berkas, pengambilan biometrik, hingga wawancara), negara telah memberikan layanan administrasi. Dalam kondisi tersebut, biaya yang telah dibayarkan tidak serta-merta dapat dikembalikan.

Sementara itu, ketentuan pembatalan permohonan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pada Pasal 17, dijelaskan bahwa permohonan paspor dapat dibatalkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen tidak sah, pemohon didapati memberikan keterangan yang tidak benar, atau alasan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam hal terjadi pembatalan, blangko paspor yang telah disiapkan akan dibatalkan dan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Lancar Wawancara, Paspor Terbit

Agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan paspor dapat diterbitkan, masyarakat diimbau untuk

1. memberikan keterangan yang benar pada saat wawancara,
2. membawa seluruh dokumen persyaratan asli sesuai ketentuan,
3. memastikan data yang diisi di aplikasi M-Paspor sesuai dengan dokumen asli, dan
4. menyiapkan dokumen pendukung sesuai tujuan perjalanan.

Sebagai contoh, siapkan dokumen sesuai tujuan: bukti pemesanan perjalanan untuk wisata, surat penerimaan institusi untuk studi, atau kontrak kerja untuk keperluan bekerja di luar negeri. Dokumen pendukung yang lengkap penting untuk meyakinkan petugas imigrasi bahwa tujuan perjalanan jelas dan sesuai ketentuan.

"Ada prosedur yang harus dijalani

dan dipatuhi agar paspor dapat diterbitkan. Persyaratan tersebut ditetapkan untuk menjaga keamanan serta keselamatan warga negara Indonesia (WNI) selama berada di luar negeri. Kami juga menekankan agar pemohon memberikan keterangan secara jujur dan terbuka saat wawancara paspor, demi kebaikan dirinya sendiri," pungkas Achmad. ■



Sumber: freepik.com

Ketika Otot Keamanan Keram: PELAJARAN MILITERISASI ICE UNTUK IMIGRASI INDONESIA

Penegakan hukum keimigrasian yang militeristik dan tanpa transparansi yang jelas akan menciptakan ketakutan, bukan keamanan. Fenomena yang terjadi pada ICE Amerika Serikat menjadi cermin bagi Indonesia dalam merancang kebijakan imigrasi yang berbasis data dan prioritas.

■ Penulis: Ayudya Aroem Brilliane

Bayangkan seorang atlet yang mengalami kram otot. Makin ia mencoba mengencangkan otot tersebut, makin sakit yang ia rasakan. Gerakan yang seharusnya melindungi tubuh justru mencederai diri sendiri. Inilah yang terjadi pada Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Amerika Serikat (AS) saat ini. Aparat yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional justru menjadi sumber ketakutan dan bahkan memakan korban jiwa warga negaranya sendiri.

Dari Penegak Hukum Jadi Pasukan Paramiliter

Berdasarkan data per 25 Januari 2026 dari TRAC Immigration, 74,2% orang yang ditahan oleh ICE tidak memiliki riwayat pidana. Banyak dari mereka hanya melakukan pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Pada Januari 2026, dua warga sipil tewas ditembak oleh agen ICE, yang memicu protes nasional. Peristiwa ini mengungkap bagaimana ICE telah bergeser dari penegakan hukum menjadi operasi militeristik yang mengutamakan target kuantitas.

Penegakan hukum keimigrasian di AS telah menjadi bentuk pemolisian yang konfrontatif dan sarat muatan politis. ICE telah menjadi instrumen politik yang menggunakan taktik paramiliter. Operasi ICE yang dilakukan serampangan menciptakan suasana intimidasi dan ketidakpastian.

Jajak pendapat Fox News pada akhir Januari 2026 menunjukkan 59% warga AS menganggap ICE terlalu agresif. Ketika ditanyakan secara spesifik apa yang bermasalah, 44% responden menyebutkan penggunaan kekerasan berlebihan,

sementara 23% memperlakukan salah sasaran.

Tiga Pelajaran Kritis untuk Indonesia

1. Penegakan Tanpa Metrik = Kekuasaan Buta

Kritik terhadap ICE adalah ketiadaan metrik yang transparan dan konsisten. McElmurry telah memperingatkan dalam artikelnya, tanpa metrik yang jelas, penegakan hukum imigrasi menjadi sewenang-wenang dan tidak akuntabel. Beberapa rekomendasi juga disampaikan dalam artikel yang sama, yaitu (1) mengukur efektivitas upaya keimigrasian dan penegakan hukum, (2) meningkatkan ketepatan alokasi sumber daya di perbatasan maupun wilayah lainnya, serta (3) memberikan informasi kepada publik dan pembuat kebijakan mengenai kondisi keamanan perbatasan. Yang terjadi, ICE pada 2025–2026 justru bergerak ke arah sebaliknya. Penegakan didasarkan pada target kuantitas, bukan dari potensi ancaman keamanan. Pelajaran yang dapat dipetik untuk Indonesia adalah sebelum memperkuat penegakan, bangun dulu sistem data yang transparan. Tanpa data, risiko penegakan yang salah sasaran akan sangat tinggi.

2. Pentingnya Kepercayaan Komunitas

Artikel yang sama menyebutkan, pemererat kerja sama antara polisi lokal dan aparat imigrasi federal sangat penting, sambil tetap membangun kepercayaan dengan komunitas imigran. Namun, ICE pada era Trump melakukan sebaliknya. Berbagai operasi menggunakan penargetan berbasis ras. Hasilnya, komunitas imigran menjadi

takut melaporkan kejahatan dan enggan berinteraksi dengan aparat. Ini justru mungkin melanggengkan kejahatan terorganisasi.

Pelajaran untuk Indonesia dari hal ini adalah pendekatan pemolisian berbasis komunitas (*community policing*) untuk Imigrasi adalah keharusan. Dalam kata pengantar artikel, Michael Chertoff menuliskan penangkal terbaik radikalisme adalah kerja sama dan upaya membangun kepercayaan dengan komunitas imigran dan masyarakat.

3. Pendekatan Berbasis Risiko

Data ICE menunjukkan absurditas penegakan hukum tanpa prioritas—sekitar 74,2% tidak memiliki riwayat pidana. Artinya, sumber daya yang terbatas digunakan untuk menahan individu yang tidak mengancam keamanan, sementara aktor berbahaya mungkin lolos karena volume yang membeludak. Masih pada artikel sama, yang bisa dilakukan adalah penapisan atau *screening* imigran tak berizin. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum keimigrasian untuk memusatkan sumber daya yang terbatas pada individu yang membutuhkan perhatian khusus. Daripada memukul rata semua orang, lebih baik fasilitasi mereka yang berisiko rendah untuk menjadi legal.

Indonesia menghadapi dinamika serupa. Ada pengungsi asing, pekerja migran yang tinggal lajak (*overstay*) karena alasan ekonomi, dan aktor kriminal. Ketiga kategori ini memerlukan respons yang sangat berbeda. Indonesia membutuhkan sistem triase untuk mengidentifikasi ancaman nyata, pihak yang membutuhkan perlindungan, dan mereka yang bisa diintegrasikan melalui jalur legal. Ini dilakukan untuk memprioritaskan sumber daya pada ancaman nyata.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi masih memiliki kesempatan untuk membangun sistem berbasis data, meningkatkan kepercayaan komunitas, dan fokus pada ancaman nyata. Meski

terdapat beberapa tekanan geopolitik, kita perlu memikirkan apakah pendekatan represif akan membuat negara lebih aman. Pelajaran dari kasus di AS menunjukkan jawabannya tidak. Yang terjadi adalah erosi kepercayaan publik, meningkatnya biaya operasional, dan yang paling tragis adanya korban jiwa.

Meregangkan Otot, Bukan Mengcangkannya

Indonesia bukan membutuhkan aparat imigrasi yang makin agresif, melainkan sistem yang lebih cerdas dan berbasis data, pendekatan yang membangun kepercayaan, dan alokasi sumber daya pada prioritas tinggi.

Mengutip artikel *Balancing Priorities*,

KEBERANIAN MELAKUKAN REFORMASI IMIGRASI AKAN SEPADAN DENGAN TERCIPTANYA SISTEM KEAMANAN NASIONAL JANGKA PANJANG YANG JAUH LEBIH KOKOH.

kebijakan keimigrasian memang tidak bisa sendirian menjawab semua tantangan keamanan. Namun, keberanian melakukan reformasi imigrasi akan sepadan dengan terciptanya sistem keamanan nasional jangka panjang yang jauh lebih kokoh. Keamanan sejati tidak datang dari kekuatan fisik semata, melainkan dari kebijaksanaan dalam membedakan ancaman dan yang perlu dilindungi.

Dari ICE AS, Indonesia belajar bahwa

keamanan nasional yang efektif bukan soal seberapa keras kita menggenggam, melainkan seberapa cermat kita memahami apa yang kita pegang. Otot yang terlatih tahu saat harus kuat dan saat harus lembut. Aparat imigrasi profesional memahami hal yang sama. Apakah kita akan menjadi negara dengan sistem imigrasi yang cerdas dan manusiawi, atau mengulang “keram otot” yang dialami AS? ■

Agen ICE di Illinois pada Januari lalu (Sumber: Christopher Dilts-Bloomberg/Getty Images)



Napas KUHAP Baru di Balik Locket Paspor:

MENUJU PARADIGMA ADMINISTRATIF- INVESTIGATIF

Efisiensi pelayanan publik dan penegakan hukum dalam layanan paspor seharusnya bertemu. Semangat KUHAP baru dapat mengubah loket pelayanan menjadi garis depan perlawanan kejahatan transnasional, menggeser paradigma dari sekadar menolak menjadi mengungkap.

■ Penulis: Emanuel Moa

Melalui aplikasi M-Paspor hingga layanan percepatan paspor sehari jadi, Imigrasi memanjakan masyarakat dengan kecepatan dan efisiensi pelayanan. Namun, di balik itu, ada sisi penegakan hukum yang membentur tembok buntu tepat di atas meja loket verifikasi dokumen atau



Kitab KUHAP Baru (ilustrasi) (Sumber: mahkamahagung.go.id: ilustrasi hasil akal imitasi)

meja loket wawancara, bahkan di ruang pengambilan keterangan.

Contohnya, ketika petugas menduga kuat bahwa pemohon akan bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, alih-alih melakukan investigasi mendalam, petugas cenderung mengambil "jalan aman" dengan menolak atau membatalkan pengajuan permohonan. Pemohon dipulangkan dengan instruksi untuk kembali lagi jika sudah mampu membuktikan keabsahan dokumen persyaratan dan data dirinya.

Pada tingkat yang lebih jauh, pemohon yang mencurigakan ini mungkin akan digiring ke ruang pemeriksaan untuk diambil keterangan melalui berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, ironisnya, di ruang sunyi tersebut, petugas sering kali masih "bermain aman" secara birokratis. Hasil BAP dalam berita acara pendapat (BAPEN) yang disusun penyidik biasanya hanya berujung pada keputusan administratif yang pragmatis: penolakan permohonan disertai penundaan pembuatan paspor bagi yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan hingga 2 tahun.

Berdasarkan aturan birokrasi, praktik petugas tersebut memang tidak salah dan sepenuhnya dapat dibenarkan. Namun, jika dilihat dengan kaca mata penegakan hukum yang lebih berani, praktik ini dapat membuat imigrasi kehilangan momentum emas. Momentum untuk membongkar sindikat kejahatan transnasional di balik ketidakabsahan dokumen persyaratan atau data diri pemohon. Dalam hal ini, penolakan justru bisa menjadi langkah pragmatis yang menyelamatkan aktor intelektual di balik layar kejahatan transnasional.

Angin Segar Terobosan KUHAP

Persoalan fundamental dalam penanganan pelayanan paspor kita saat ini adalah kecenderungan untuk melihat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya mengenai pemberian data tidak benar, hanya sebagai alat pemutus layanan atau instrumen penolakan teknis. Padahal, mayoritas pemohon yang terjepit masalah pemalsuan dokumen persyaratan dan data diri adalah para korban yang minim informasi. Mereka hanyalah bidak kecil dalam papan catur perda-

ngan orang atau pengiriman tenaga kerja ilegal yang dioperasikan secara sistematis oleh para calo dan agen nakal.

Ketika hanya memberikan penolakan administratif tanpa pendalaman investigatif, petugas sedang memberikan napas baru bagi para pemain di balik layar. Penolakan tersebut adalah kesempatan emas bagi sindikat untuk menjadi lebih rapi dan licin. Oleh karena itu, penting untuk menyerap semangat hukum pidana modern ke loket verifikasi dokumen persyaratan atau loket wawancara paspor hingga ruang pemeriksaan.

Hadirnya KUHAP baru membawa angin segar melalui terobosan yang sangat progresif, yakni pengakuan terhadap mekanisme yang serupa dengan *plea bargaining* atau jalur kesepakatan dalam penyelesaian perkara. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat penegakan hukum yang kaku (retributif), tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Momentum ini harus ditangkap untuk mengubah gaya penolakan paspor kita, dari sekadar urusan administratif menjadi langkah administratif-investigatif. Penegakan hukum melalui Pasal 126 UU Keimigrasian tidak lagi menjadi titik akhir, tetapi menjadi pintu masuk untuk membedah jaringan pemalsuan yang sistemis.

Dari Loket Jadi Ruang Investigasi

Menjadikan loket verifikasi berkas permohonan atau loket wawancara paspor hingga ruang pemeriksaan sebagai ruang investigasi awal (titik deteksi dini) bukan berarti menghambat kecepatan pelayanan. Sebaliknya, ini adalah upaya memperkuat perlindungan negara terhadap warganya. Ada tiga langkah konkret yang bisa mulai diimplementasikan secara serius.

Pertama, penerapan wawancara berbasis insentif (*incentive-based interview*). Petugas loket berfungsi sebagai "sensor" pertama. Saat indikasi Pasal 126 ditemukan, alur tidak berhenti pada penolakan, tetapi dialihkan ke pemeriksaan lanjutan di ruang privat. Petugas dapat menawarkan diskresi administratif: penangguhan sanksi pencegahan bagi pemohon yang bersedia mengungkapkan identitas sponsor atau lokasi penam-

pungan ilegal. Inilah penerapan konkret *plea bargaining* di loket layanan paspor; membarter sanksi ringan demi informasi strategis untuk menangkap pelaku utama yang lebih besar.

Kedua, pelacakan melalui forensik digital yang bersifat kolaboratif. Untuk menjembatani keraguan atas dokumen fisik, aspek digital menjadi instrumen pembuktian baru. Pemohon yang meragukan diberi ruang untuk membuktikan kebenaran keterangannya melalui pemeriksaan perangkat komunikasi secara sukarela. Jejak digital ini akan memetakan komunikasi pemohon dengan sindikat, yang jika dikelola secara sistematis akan menjadi basis data digital forensik untuk memburu aktor intelektual di balik layar.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah rekonstruksi substansi BAP. Selama ini, proses penegakan hukum sering kali berhenti di ruang pemeriksaan hanya untuk menghasilkan sanksi administratif berupa penundaan permohonan paspor. BAP selama ini seolah-olah hanyalah alat birokrasi untuk menolak permohonan yang kemudian diarsipkan begitu saja.

Dalam model administratif-investigatif, BAP harus "bermutasi" menjadi "laporan informasi intelijen" yang memiliki nilai pembuktian awal. Pengakuan pemohon mengenai siapa yang membiayai permohonannya dan ke mana tujuan aslinya harus dikunci sebagai alat bukti permulaan yang sah untuk menggerakkan aktor intelektual, sesuai dengan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP baru. BAP tidak boleh lagi berakhir di gudang arsip sebagai dokumen mati, tetapi harus menjadi dokumen hidup, pemasok data intelijen untuk memburu mereka yang bersembunyi di balik pelanggaran tersebut.

Transformasi ini pada akhirnya menegaskan bahwa layanan prima dan penegakan hukum yang tajam adalah dua sisi dari koin yang sama. Petugas loket tidak hanya diposisikan sebagai sekadar verifikator dokumen atau petugas wawancara paspor. Mereka "penyidik" pertama yang bersentuhan langsung dengan potensi kejahatan transnasional.

Kecepatan dan efisiensi layanan paspor harus berjalan seiring dengan keberanian memutus mata rantai kejahatan. Pada era KUHAP baru ini, menolak paspor harus menjadi pernyataan tegas bahwa kita tidak hanya menutup pintu, tetapi juga aktif memburu siapa pun yang bersembunyi di balik potensi pelanggaran. Menolak harus berarti mengungkap. ■

PENOLAKAN JUSTRU BISA MENJADI LANGKAH PRAGMATIS YANG MENYELAMATKAN AKTOR INTELEKTUAL DI BALIK LAYAR KEJAHATAN TRANSNASIONAL.

Efek Dunning–Kruger dan Budaya Kerja Kita: ANTARA GENGSI, SENIORITAS, DAN KETAKUTAN DIKRITIK

Mereka yang paling vokal sering kali yang paling minim kontribusi, sementara mereka yang paling kompeten justru sibuk meragukan dirinya sendiri. Inilah beban ganda dunia kerja kita: antara gengsi tanpa kapasitas dan kapasitas tanpa keberanian.

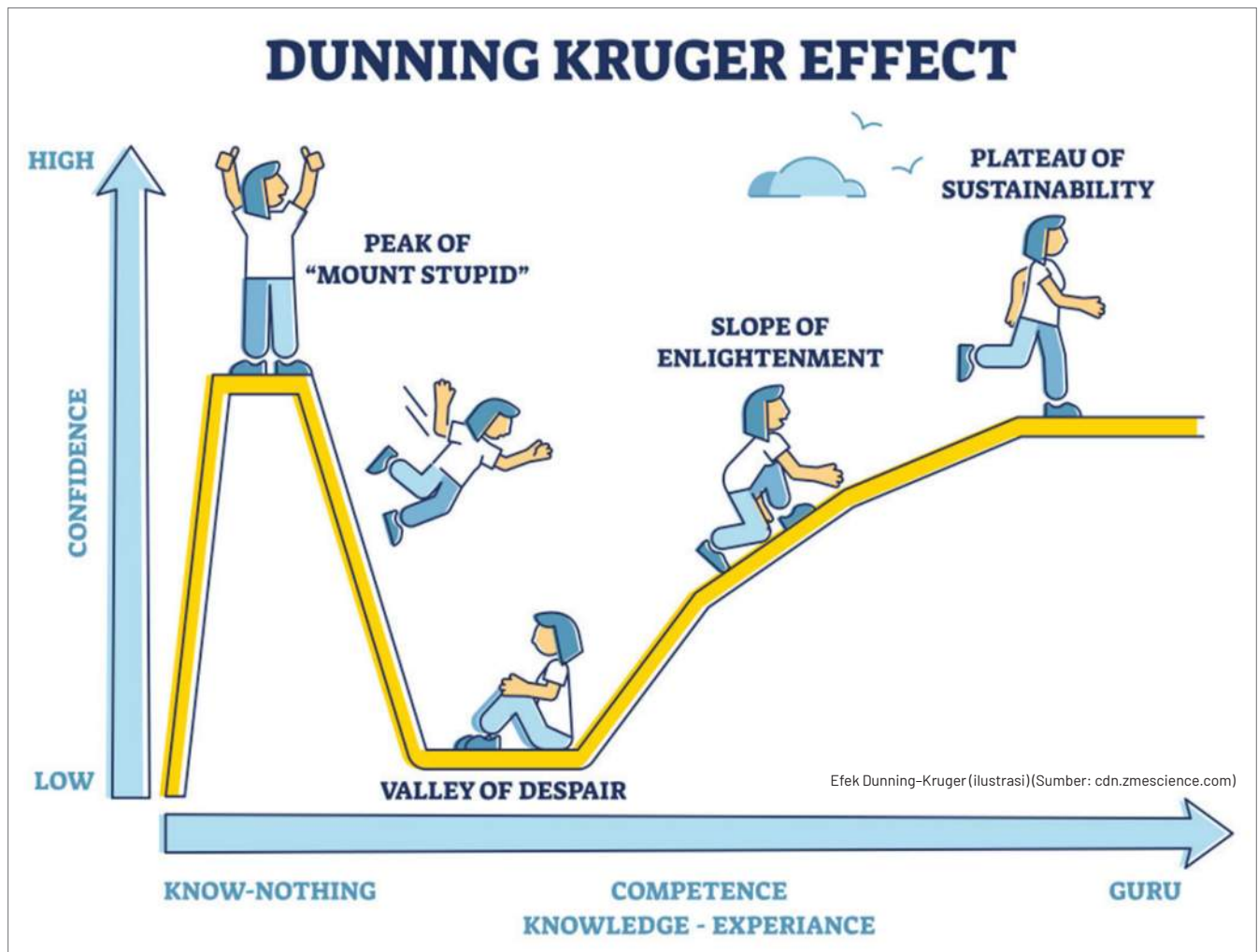
■ Penulis: Amilta Sabbiha Hanin

Beberapa pekan lalu, seorang rekan bercerita tentang rapat divisinya. Di kantor yang sama, ada dua tipe karyawan yang bertolak belakang. Si A, seorang karyawan biasa dengan masa kerja lima tahun, dengan percaya diri me-

maksakan strategi pemasarannya meski menolak data riset. Kampanye berdasarkan "instingnya" akhirnya gagal. Sementara itu, si B, seorang kepala divisi berprestasi, justru ragu bersuara dalam rapat. Padahal, ketika ia bicara, analisisnya tajam dan solusinya tepat.

Dua potret ini bukan sekadar cerita *random office life*. Ini adalah fenomena psikologis yang pada 1999 diangkat oleh David Dunning dan Justin Kruger, yaitu mereka yang tidak kompeten cenderung *overestimate* atau melebih-lebihkan kemampuan diri, sedangkan mereka yang kompeten justru meremehkan kemampuan diri karena berasumsi bahwa tugas yang mudah bagi mereka juga mudah bagi orang lain.

Namun, dua dekade setelah studi itu dipublikasikan, kita masih membiarkan ironi ini menjadi budaya diam-diam yang merugikan organisasi. Mengapa?



Inkompetensi dari Ketidaksadaran

Dunning dan Kruger menemukan bahwa inkompetensi bukan hanya soal kurangnya kemampuan, melainkan juga kurangnya metakognisi, yaitu kemampuan untuk menyadari ketidakmampuan itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai *dual burden*; melakukan kesalahan tidak berarti mampu melihatnya sebagai kesalahan.

Saya pernah menyaksikan seorang manajer bersikeras menggunakan perangkat lunak analisis usang karena “selama ini tidak ada masalah”. Ketika tim menunjukkan bahwa kompetitor sudah beralih ke platform berbasis akal imitasi (AI) yang lebih akurat, ia menjawab, “Ah, itu cuma gimik *marketing*.” Inkompetensinya tidak terletak pada ketidakmampuan menggunakan teknologi baru, tetapi pada ketidakmampuan mengenali bahwa ia perlu belajar.

Beban Kompetensi bagi yang Ahli

Di kutub berlawanan, ada mereka yang disebut *the competent but self-deprecating*: orang berkapasitas tinggi yang justru merendahkan diri. Ironisnya, makin dalam penguasaan seseorang, makin ia sadar akan banyaknya hal yang belum diketahuinya.

Di birokrasi Imigrasi, saya menemukan kasus serupa. Seorang analis kebijakan setiap hari membaca putusan pengadilan, membandingkan yurisprudensi, dan diam-diam menulis draf revisi aturan yang responsif terhadap kebutuhan diaspora. Ia tahu celah-celah regulasi yang dimanfaatkan sindikat pemalsuan dokumen. Ia punya solusi, tetapi tak pernah bersuara dalam rapat.

Alasannya: “Ah, saya ‘kan cuma staf. Nanti dibilang sok tahu.”

Ini bukan soal sikap rendah diri, melainkan standar internal yang terlalu tinggi dan kekeliruan persepsi bahwa kompeten berarti tahu segalanya. Padahal, kompetensi sejati justru ditandai dengan kesadaran akan batas pengetahuan diri sendiri.

Dampak yang Mungkin Terjadi

Pertama, alokasi sumber daya yang salah. Proyek strategis kerap diberikan

kepada individu paling vokal, bukan paling kapabel, karena kepercayaan diri disamakan dengan kompetensi. Akibatnya, proyek mandek dan inovasi terhambat karena inkompetensi.

Kedua, demotivasi karyawan kompeten. Ketika ide brilian mereka “kalah” oleh argumen dangkal yang disampaikan dengan penuh keyakinan, mereka menarik diri. Fenomena *learned helplessness* ini membuat mereka memilih diam karena lelah berdebat, bukan karena tak punya pendapat.

Ketiga, stagnasi organisasi. Individu dengan kepercayaan diri berlebih yang *underdeliver* (memberikan hasil yang lebih rendah daripada yang dijanjikan) cenderung defensif terhadap umpan balik, menolak evaluasi, dan memusuhi kritik. Akibatnya, organisasi kehilangan kemampuan belajar kolektif.

Dua kantor imigrasi dapat menjadi contoh kontras. Pada kantor pertama, seorang manajer menolak dasbor waktu nyata karena merasa hafal kinerja tim dan khawatir staf stres—ia memilih rekap manual meski tim data menjelaskan dasbor bisa mendeteksi anomali. Pada kantor kedua, seorang pemimpin menggunakan dasbor sebagai alat bantu, mendengar keluhan tim, dan menyempurnakan sistem. Hasilnya, waktu tunggu turun, anomali terdeteksi dini, dan staf merasa didukung, bukan diawasi.

Membaca Ulang Fenomena

Alih-alih menyalahkan individu, kita perlu membaca fenomena ini sebagai produk sistem. Efek Dunning-Kruger tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh subur di lingkungan yang seperti berikut ini.

Pertama, memercayai senioritas sebagai otoritas. Kita cenderung menganggap karyawan lama sebagai ahli, padahal pengalaman tanpa refleksi hanyalah pengulangan. Di Imigrasi, seseorang dengan percaya diri menolak kemudahan investasi asing karena “yang penting patuh aturan”—ia tak paham bahwa negara lain sudah berlari dengan *golden visa*. Menyedihkannya lagi, ia tak merasa perlu tahu.

Kedua, lebih menghargai kecepatan bicara daripada ketepatan berpikir.

Dalam rapat, siapa yang paling cepat merespons sering dianggap paling cerdas. Padahal, orang kompeten cenderung berpikir lama karena memetakan konsekuensi.

Ketiga, tidak memiliki mekanisme umpan balik yang jujur. Kritik dianggap sebagai sebuah pembangkangan sehingga individu yang terlalu percaya diri tak pernah dikoreksi. Mereka hidup dalam gelembung keyakinan diri sendiri karena tak ada yang berani mengatakan sebaliknya.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Pertama, bedakan kepercayaan diri dari kompetensi. Berhenti mengagumi suara lantang tanpa substansi. Harga kualitas gagasan, bukan volume kelantangan.

Kedua, ciptakan budaya umpan balik yang normal. Jika kritik hanya datang dari atasan ke bawahan, umpan balik akan selalu dianggap sebagai hukuman. Bangun mekanisme yang memungkinkan siapa saja memberikan masukan kepada siapa pun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, misalnya, bisa merintis forum diskusi horizontal yang setara tanpa hierarki.

Ketiga, latih metakognitif. Ajak karyawan merefleksikan proses berpikir mereka. Dorong karyawan kompeten yang ragu-ragu untuk melihat bahwa berbagi pengetahuan adalah bentuk kontribusi.

Keempat, gunakan data untuk meruntuhkan ilusi. Orang yang percaya diri berlebih sulit membantah data. Sebab, data akan berbicara lebih keras daripada retorika.

Kelima, tanamkan kerendahan hati intelektual sebagai nilai institusi. Promosikan keberanian untuk mengakui ketidaktauhannya. Kepala kantor yang berkata “Saya belum paham, tolong jelaskan” tidak kehilangan wibawa. Ia justru membangun kepercayaan.

Dunia kerja membutuhkan ekosistem tempat kepercayaan diri sebanding dengan kapabilitas dan keraguan tidak dianggap lemah. Setiap keputusan adalah pilihan: bertindak sebagai orang yang merasa tahu segalanya, atau menjadi pemelajar seumur hidup yang melayani, bukan menghakimi?

Efek Dunning-Kruger bukan vonis permanen, melainkan cermin pekerjaan rumah kita. Jika jujur melihat celah antara persepsi dan realitas, kita punya kesempatan untuk terus tumbuh. ■

*Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili institusi mana pun.

DUNNING DAN KRUGER MENEMUKAN BAHWA INKOMPETENSI BUKAN HANYA SOAL KURANGNYA KEMAMPUAN, MELAINKAN JUGA KURANGNYA METAKOGNISI.

Latih Kesadaran:

MENJAGA KEWARASAN PADA ERA INFORMASI

Transformasi digital telah membuka keran informasi tanpa batas. Namun, di balik kemudahannya, ancaman terhadap kesehatan mental mengintai melalui fenomena kelelahan epistemik. Bagaimana cara menyikapi banjir informasi tanpa kehilangan akal sehat?

■ Penulis: Amelia Choirun Nisa (psikolog klinis RS Paru Manguharjo Jawa Timur)

Transformasi digital telah membawa kemudahan luar biasa dalam mempercepat produktivitas di semua sektor. Dengan mudah kita juga dapat mengakses berita dunia yang dahulu sulit didapatkan. Namun, ekosistem penyampaian berita yang sangat kompetitif dan tanpa henti sering kali mendorong fenomena umpan klik (*clickbait*) di media sosial yang cenderung menonjolkan narasi negatif atau dramatis.

Doomscrolling dan Kelelahan Epistemik

Belakangan ini, kita sering mendengar istilah *doomscrolling*, yaitu kebiasaan untuk terus menelusuri artikel atau berita negatif. Padahal, paparan tanpa henti terhadap berita bencana global, ketidakstabilan ekonomi, konflik geopolitik, hingga skandal besar seperti kasus Epstein, dapat memicu stres dan kelelahan mental kronis yang disebut juga sebagai kelelahan epistemik.

Fenomena kelelahan epistemik muncul akibat upaya intens seseorang untuk mempertahankan atau memproses keyakinan di tengah terjangan skeptisisme dan ketidakadilan yang berulang. Kelelahan mental ini menjadi sinyal bahwa sistem saraf kita terus-menerus terpapar oleh hal-hal yang mengancam rasa aman.

Pentingnya Batasan Sehat

Nasihat bijak mengatakan, "*What you resist, persists.*" Artinya, apa yang kita lawan justru akan terus menetap. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan mental, kita perlu menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan saat mengonsumsi informasi. Hindari menekan reaksi emosional kita sendiri terhadap "berita berat" tersebut. Kita harus berani bertanya kepada diri sendiri: Apakah seluruh

informasi ini benar-benar diperlukan saat ini? Ataukah informasi ini hanya memperpanjang kegelisahan diri? Sejauh mana batas sehat bagi diri kita sendiri?

Menetapkan batasan dan menyaring berita adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Memahami siklus pola pikir yang berlebihan adalah langkah awal yang penting untuk mencapai kejernihan mental.

Mindfulness: Hadir secara Utuh

Salah satu cara efektif untuk keluar dari situasi ketidaknyamanan mental adalah melalui praktik *mindfulness*. Secara etimologis, *mindfulness* berarti 'bersikap penuh perhatian; sebuah keadaan sadar terhadap momen saat ini—di sini dan kini (*here and now*).

Penelitian psikolog klinis serta pakar kesadaran dan *mindfulness* dari University of Duke Dr. Shauna Shapiro, Ph.D. menunjukkan bahwa otak yang terlatih dengan *mindfulness* dapat mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan produktif. Praktik *mindfulness* dapat memperbaiki aktivitas mental, mengubah konektivitas otak, serta mengurangi respons tubuh terhadap stres.

Yi-Yuang Tang dari Arizona State University dalam bukunya yang terkenal, *How the Body and Mind Work Together to Change Our Behavior*, menambahkan bahwa tubuh dan pikiran bekerja sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Melatih sistem saraf melalui langkah sederhana, seperti memperlambat gerakan, menurunkan ritme, dan memberi jeda pada respons otomatis dapat membantu otak kita keluar dari mode siaga yang berkepanjangan. Saat sistem saraf lebih teregulasi, perubahan perilaku menjadi lebih mungkin terjadi secara alami dan berkelanjutan.

Menurut Dr. Shauna Saphiro, terdapat tiga elemen penting berikut ini dalam melaksanakan *mindfulness*.

1. *Intention* (niat): menggunakan hati sebagai kompas untuk mengarahkan harapan dan nilai-nilai mendalam
 2. *Attention* (perhatian): melatih dan membumikan pikiran pada momen saat ini
 3. *Attitude* (sikap): memperhatikan sesuatu dengan sikap welas asih dan rasa ingin tahu
- Ketiga elemen tersebut dapat diterapkan dalam rutinitas sederhana, seperti saat makan (*mindful eating*), berjalan (*mindful walking*), hingga bernapas (*mindful breathing*).

Langkah Praktis Melatih Kesadaran

Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk melatih kehadiran diri (*self-presence*) agar bisa membantu memproses berita yang melelahkan secara emosional.

1. Luangkan waktu khusus. Sisihkan waktu setiap hari secara formal untuk mempraktikkan kesadaran.
2. Lakukan latihan terfokus berikut ini.
 - *Body scanning*: Fokuskan perhatian ke dalam tubuh dan rasakan sensasi apa pun yang muncul di setiap bagian badan.
 - Pernapasan 4-4-6: Tarik napas melalui hidung dalam 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, dan buang secara perlahan melalui mulut dalam 6 hitungan.
 - Meditasi *mindfulness*: Duduk dengan tenang selama 10-30 menit dan fokus hanya pada pernapasan, tanpa bergerak.

Ketika tubuh dalam keadaan tegang dan kaku, otak cenderung dalam mode siaga atau bertahan. Dalam

keadaan tersebut, kita tidak akan bisa mengakses potensi penuh diri kita. Kita juga akan sulit mengakses kejernihan berpikir dan empati. Oleh karena itu, yang kita perlukan bukanlah memaksakan diri, melainkan melatih sistem saraf kita tetap rileks dengan penuh kesadaran secara teratur dan penuh kelembutan.

Menghubungkan kembali tubuh dan pikiran dengan sesuatu

Sehat secara mental (ilustrasi)
(Sumber: accessinn.com)



yang sudah ada di dalam diri kita, seperti napas kita, akan mengaktifkan potensi dari sumber daya batin. Dalam kehidupan, kita menjadi sadar bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan.

Selain itu, memberi izin kepada diri sendiri untuk benar-benar menikmati momen kecil dalam keseharian juga menjadi langkah sederhana mencegah stres terus bergulir. Untuk kita yang terbiasa sarapan dan meneguk secangkir kopi pada pagi hari, alih-alih sambil menggeser layar ponsel atau memikirkan daftar tugas, berilah ruang

untuk merasakan pengalaman itu secara utuh—aroma kopi, suhu cangkir di tangan, tekstur makanan, hingga rasa yang tertinggal di lidah. Kita bahkan dapat membayangkan diri kita sebagai kritikus makanan atau Q Grader yang mengamati setiap detail rasa dengan penuh perhatian. Latihan sederhana ini membantu otak berpindah dari mode otomatis dan reaktif menuju mode sadar dan terhubung.

Melalui praktik-praktik sederhana, kita melatih kemampuan metakognisi, yaitu kemampuan untuk mengenali proses berpikir itu sendiri. Hal ini memberi kita kesempatan untuk merasakan dunia secara langsung dengan mengurangi prasangka. Dengan pandangan yang luas, rasa syukur, dan rasa ingin tahu, kita dapat memutus lingkaran negatif informasi dan masuk ke lingkaran positif yang menenangkan. ■

KELELAHAN MENTAL INI MENJADI SINYAL BAHWA SISTEM SARAF KITA TERUS-MENERUS TERPAPAR OLEH HAL-HAL YANG MENGANCAM RASA AMAN.

BEGINI RASANYA JADI TETANGGA NEGERI JIRAN

Bagi warga Batam, menyeberang ke Singapura atau Malaysia bukanlah hal mewah. Jarak "sepelemparan batu" dengan Negeri Jiran membuat paspor menjadi sebuah kebutuhan bagi warga Batam untuk kemudahan melintas.

■ Penulis: Thitien Setyaningsih

"Cepat, Dik, nanti keburu antreannya panjang," ucap Said (bukan nama sebenarnya) setengah berteriak memanggil putrinya yang masih tertinggal di belakang, sambil mendorong sebuah koper kecil beroda. Sambil menunggu, Said menoleh ke lantai dua untuk mengamati kondisi antrean lapor masuk atau *check-in*. "Masih aman," gumamnya lega karena barisan para penumpang belum terlalu padat.

Suasana tersebut bukanlah pemandangan asing di Pelabuhan

Penumpang Internasional Batam Center setiap harinya, terlebih saat akhir pekan dan musim liburan. Pelabuhan itu akan ramai oleh penumpang atau warga Batam yang akan menyeberang ke Singapura atau Malaysia.

"Adik semangat, *dong*. 'Kan, mau ke Legoland," ujar istri Said sambil tersenyum, menyemangati putri kecilnya yang masih mengantuk. Waktu baru menunjukkan pukul 05.15. Mereka sengaja berangkat lebih awal demi mengejar feri pertama agar waktu liburan sang anak lebih leluasa.

Bagi orang luar Batam, keluarga Said mungkin terlihat seperti keluarga berkecukupan yang gemar berlibur ke luar negeri. Padahal, menurut Said, pilihan itu lebih didasari pertimbangan praktis. Hari libur pada Jumat atau akhir pekan panjang sering kali justru lebih efisien jika digunakan untuk bepergian ke negara tetangga dibandingkan kota wisata domestik, seperti Bali atau Bandung. Pilihan serupa juga diambil banyak warga Batam lainnya, sebuah fenomena yang sudah lumrah di kota perbatasan ini.

Jarak dan Biaya yang Terjangkau

Secara geografis, Kota Batam terletak sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura, dengan waktu tempuh laut sekitar 45 menit ke Singapura dan sekitar dua jam ke Johor Bahru. Kedekatan ini menjadikan perjalanan

Liburan ke Malaysia (ilustrasi) (Sumber: legoland.com.my)



lintas negara sebagai opsi liburan yang mudah dan cepat.

“Kalau ke Jakarta saja, tiket pulang-pergi bisa habis Rp2,5 juta per orang. Bertiga sudah Rp7,5 juta, belum hotel dan biaya lainnya,” tutur Said kepada kerabatnya di luar kota. Sementara itu, tiket feri internasional pulang-pergi dapat diperoleh dengan biaya yang jauh lebih kompetitif, hanya Rp650 ribu per orang. Kondisi ini membuat Batam seolah berbagi halaman depan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hari, seorang pengusaha kuliner yang kerap menghabiskan akhir pekan di Singapura untuk berbelanja atau mencari inspirasi bagi usahanya. Perjalanan tersebut biasanya ia tempuh tanpa perlu menginap.

“Berangkat pagi, malamnya sudah bisa kembali,” ujar Hari. Bahkan baginya, bepergian ke luar negeri dapat dilakukan tanpa banyak persiapan. Cukup dengan paspor yang masih berlaku, tiket feri, dan penukaran uang yang bisa langsung dilakukan di pelabuhan. Transaksi nontunai yang tersedia juga membuatnya tidak perlu menyiapkan uang tunai.

Fasilitas dan Tantangan Mobilitas Tinggi

Tingginya minat warga Batam ke luar negeri tercermin dalam data Imigrasi 2025. Tercatat ada 76.252 permohonan paspor baru dan penggantian paspor, dengan total keberangkatan WNI mencapai 1,29 juta orang. Arus keberangkatan terbesar terkonsentrasi di Pelabuhan Penumpang Internasional Batam Center, Harbour Bay, dan Sekupang.

Pemandangan padat deretan koper yang dibawa penumpang dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia yang menggunakan kursi roda, tidak menyurutkan semangat untuk bepergian. Akses dan fasilitas yang tersedia mempermudah perjalanan mereka, mulai dari jalur khusus difabel hingga fasilitas keimigrasian seperti *autogate* yang membantu mengurangi antrean panjang di area pemeriksaan. Proses pemeriksaan keimigrasian dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Walaupun terjadi antrean, alurnya tetap bergerak lancar. Secara keseluruhan, perjalanan dari Batam hingga tiba di Singapura atau Malaysia, termasuk proses imigrasi, dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam.



Liburan ke Singapura (ilustrasi) (Sumber: traveloka.com)

Di tengah tingginya mobilitas tersebut, Imigrasi Batam menempatkan diri sebagai fasilitator perlintasan bagi masyarakat. Imigrasi tidak hanya menjalankan tugas pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan pelayanan berjalan cepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Kemudahan birokrasi pengurusan paspor melalui aplikasi M-Paspor, yang didukung fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat ke negara tertentu, turut menjamin kelancaran perjalanan ke luar negeri. Bagi masyarakat Batam, paspor bukan lagi dokumen eksklusif, melainkan kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Namun, peningkatan mobilitas tersebut juga menuntut kesiapan ekstra dari Imigrasi Batam dan pemangku kepentingan pendukung terkait. Penambahan personel, optimalisasi *autogate*, serta pengaturan alur penumpang menjadi bagian dari upaya menjaga kenyamanan dan keamanan di pelabuhan internasional.

Realistis, Bukan Hedonis

Liburan ke Singapura atau Malaysia bukan melulu soal kemewahan. Pilihan itu justru tentang jarak dan biaya yang terjangkau serta efisiensi waktu. Tentang keluarga yang ingin perjalanan tanpa harus mengambil cuti panjang. Tentang pekerja yang butuh jeda singkat sebelum mereka kembali beraktivitas.

Di Batam, ajakan ke Singapura atau Johor sering kali terdengar lebih masuk akal daripada rencana ke Jakarta karena alasan biaya. Kedekatan geografis ini menjadikan perjalanan

SEBAGAI FASILITATOR PERLINTASAN, IMIGRASI TURUT MEMASTIKAN SETIAP PERJALANAN WNI KE LUAR NEGERI BERJALAN TERTIB DAN AMAN.

lintas negara bak singgah ke kota sebelah, sebuah privilese yang tersedia bagi penduduk “tetangga Negeri Jiran”.

Sering kali, pilihan warga Batam untuk berlibur ke Singapura atau Malaysia dianggap sebagai gaya hidup mewah. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, ini adalah keputusan yang sangat praktis. Bagi mereka, negara tetangga menawarkan jarak yang lebih dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya yang jauh lebih masuk akal.

Pemandangan di Pelabuhan Penumpang Internasional Batam setiap akhir pekan menjadi buktinya. Deretan koper dan antrean paspor, seperti yang dilakukan keluarga Said dan Hari, adalah cerita yang terus berulang. Di sana, perjalanan lintas negara bukan lagi semata gengsi, melainkan cara warga perbatasan beradaptasi dengan kenyataan bahwa “ke luar negeri” memang lebih efektif dan logis bagi dompet mereka.

Dalam arus mobilitas yang padat ini, pihak Imigrasi berperan memastikan setiap pelancong bisa melintas dengan aman dan tertib. Pada akhirnya, tren liburan ini bukan sekadar pamer destinasi, melainkan cara cerdas warga Batam untuk memanfaatkan akses di depan mata mereka. ■

MOMEN RAMADAN BERKESAN ALA PETUGAS IMIGRASI

Ramadan selalu sarat akan kesan dan kenangan, dari kisah yang menyentuh hati hingga memori kenakalan yang tak terlupakan. Mari simak ragam momen berkesan ala petugas Imigrasi di seluruh Indonesia dalam menjalani bulan Ramadan.



Amparan Tatak dan Puji Tuhan

Sabtu sore di Pasar Wadai Banjarmasin pada bulan Ramadan, dengan lemas dan berkeringat dingin, saya mengantres buah dan kue amparan tatak. "Sabar, Neng. Pahala puasanya besar!" kata ibu di samping saya. Saya pun mengangguk mantap. Begitu azan berkumandang, saya lantas minum dan berseru lantang, "Puji Tuhan! Terima kasih, Tuhan Yesus!" Seketika penjual kue di hadapan saya terpana. Saya hanya mampu tersenyum malu. Karena terlalu larut dalam kemeriahan war takjil, saya lupa camilan tersebut sebenarnya untuk bekal ke gereja.

Citra H. Gultom
(Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel)

Jembatan Harapan di Meja Informasi

Di tengah hiruk pikuk antrean bidang informasi layanan paspor, seorang ibu datang membawa putrinya yang sakit. Ia memohon agar proses penerbitan paspor dipercepat guna keperluan berobat ke luar negeri. Sambil menjalankan ibadah puasa, saya menjelaskan prosedur dengan tenang. Ketika proses tersebut akhirnya selesai, sang ibu menengis haru seraya berulang kali mengucapkan terima kasih. Pada saat itulah saya menyadari bahwa tugas yang kami jalankan sesungguhnya menjadi jembatan harapan bagi mereka yang mengalami kesulitan.

Lukman Supriadi
(Kantor Imigrasi Pekanbaru)



Keberkahan dari Tanah Timur

Masa kecil saya di Papua selama bulan Ramadan adalah tentang petualangan mencari tanda tangan ustaz usai ceramah salat Tarawih. Akan tetapi, hal yang paling membekas adalah keramahan para pekerja asing di sana. Meskipun tidak menjalankan ibadah puasa, mereka kerap membagikan jatah makanan kepada kami anak-anak kecil. Pengalaman berbagi tanpa memandang latar belakang di Tanah Timur itulah yang saya hayati sebagai salah satu wujud keberkahan Ramadan yang sebenarnya.

Kia Nazwa Anela
(Kantor Imigrasi Cilegon)



Ibadah dalam Repatriasi

Tugas yang paling berkesan bagi saya adalah ketika menangani proses repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan perbatasan. Pagi saya melayani penumpang reguler, siangnya memeriksa paspor PMI yang dipulangkan satu per satu. Di tengah antrean panjang tanpa suasana hangat sebagaimana di rumah, saya menyaksikan wajah-wajah lelah yang merindukan keluarga. Memastikan mereka dapat kembali dengan selamat dan bermartabat di tengah pelaksanaan ibadah puasa merupakan bentuk pengabdian yang sangat bermakna bagi saya.

Muh. Fahreza Firdaus
(Kantor Imigrasi Nunukan)



Aroma Petrikor dan Kenangan yang Tertinggal

Setiap kali hujan sore turun membawa aroma petrikor, ingatan saya kembali ke tahun 2006. Ayah memboncengkan saya mencari takjil, Ibu menyemangati agar saya kuat berpuasa sampai magrib, serta bercanda bersama kawan-kawan di masjid. Kini, tahun 2026, aroma yang sama masih tercium, tetapi waktu telah membawa saya menuju fase kehidupan yang berbeda. Kebahagiaan Ramadan sering kali terletak pada hal-hal sederhana yang kini hanya dapat saya kenang.

Revnus Gadang
(Kantor Imigrasi Yogyakarta)



Pelajaran dari Masa Pramuniaga

Saya menjalani Ramadan sebagai pramuniaga pada 2019. Saya bekerja ekstra keras menjelang Lebaran dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Menahan emosi dan dahaga saat melayani pelanggan menjadi ujian kesabaran. Meskipun demikian, kebaikan justru hadir dari hal-hal yang tidak terduga, seperti takjil dari pelanggan atau paket sembako dari atasan. Pengalaman dari masa itu turut membentuk pribadi saya agar lebih tangguh dalam melayani masyarakat hingga saat ini.

Akmal Ageng P.
(Kantor Imigrasi Madiun)

Ritme Sederhana di Tepian Jalan

Di Kalimantan Barat, bulan Ramadan identik dengan bunyi alu yang memukul papan kayu—tanda kehadiran penjual sotong pangkong. Seselesaiannya salat Tarawih, saya hampir selalu menyempatkan diri untuk membelinya. Dengan harga yang terjangkau, aroma sotong bakar dan sambal kacang menjadi penanda kepulangan yang hangat. Bagi saya, ritual sederhana ini bukan melulu tentang makanan, melainkan juga rasa syukur dan kebersamaan bersama keluarga yang senantiasa membuat saya rindu pulang.

Desty Ramadani (Kantor Imigrasi Entikong)



Menjaga Tradisi di Tanah Rantau

Bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang jauh dari keluarga besar menuntut saya untuk menciptakan suasana rumah sendiri. Saya tetap melestarikan tradisi *meugang* khas Aceh, yakni memasak daging sapi atau kambing untuk menyambut awal Ramadan. Memasak sop iga atau rendang di rumah kecil di Madiun menjadi cara untuk mempertahankan identitas dan kehangatan keluarga. Ramadan bagi saya adalah proses belajar ikhlas dalam keterpisahan sembari tekun mengabdikan kepada negara.



Deny Fitri Ayu R. (Kantor Imigrasi Madiun)



Kegembiraan dalam Antrean Takjil

Bagi saya, esensi ngaburrit terletak pada kemeriahan jalanan yang tiba-tiba dipadati penjual takjil. Ada kegembiraan tersendiri ketika menyaksikan deretan dagangan, seperti es kelapa muda dan gulai. Meskipun harus mengantre dan berdesakan, antusiasme masyarakat dalam mencari hidangan berbuka puasa senantiasa membangkitkan semangat. Keseruan kolektif itulah yang menjadikan suasana Ramadan di Indonesia terasa begitu hidup.

Teuku Fausa Febrian
(Ditjen Imigrasi)



Drama dan Tawa di Saf Belakang

Setiap kali mengenang Ramadan dari masa kecil, saya teringat teman sebaya di masjid saat salat Tarawih. Alih-alih beribadah khuyuuk, kami justru kerap ditegur karena bercanda di saf belakang. Kami baru akan berpura-pura rajin ketika imam telah mencapai rakaat terakhir. Saling mencubit hingga berburu cilok setelah salat merupakan kepingan memori yang senantiasa membuat saya tersenyum saat bulan suci ini kembali hadir.

Eka Safitri
(Ditjen Imigrasi)



Berkas Persyaratan Paspor



Paspor Baru

1. **KTP Elektronik**
2. **Kartu Keluarga**
3. **Akta Kelahiran/
Ijazah/Buku Nikah**

Penggantian Paspor

1. **KTP Elektronik**
2. **Paspor Lama**





PERSYARATAN PASPOR ANAK

Dokumen Persyaratan

- KTP elektronik ayah atau ibu
- Kartu keluarga
- Akta kelahiran
- Akta perkawinan atau buku nikah orang tua
- Paspor lama anak (untuk penggantian)
- Fotokopi paspor ayah atau ibu bagi yang memiliki



Jangan Lupa!

- Sediakan meterai Rp10.000.
- Kedua orang tua harus mendampingi saat pembuatan paspor.
- Serahkan surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan paspor anak.



Informasi Penting

Bayi di bawah 5 tahun (balita) **tidak perlu mendaftar** di aplikasi M-Paspor.





Petugas dari Imigrasi KJRI Jeddah membantu jemaah haji (Foto: Dok. KJRI Jeddah)

KABAR DARI NEGERI HIJAZ

Gedung Yandu di Jeddah tak pernah sepi dari WNI yang menghadapi masalah dokumen. Di balik keriuhan itu, terselip misi kemanusiaan untuk memastikan setiap anak bangsa pulang dengan selamat.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Matahari baru saja naik di ufuk Laut Merah, tetapi keriuhan di Gedung Pelayanan Terpadu (Yandu) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah terasa. Di salah satu sudut ruang tunggu, seorang pria lansia tampak memilin ujung bajunya dengan wajah pias. Di tengah jutaan jemaah yang memadati Masjidil Haram beberapa waktu lalu, ia kehilangan tas kecilnya. Di dalam tas tersebut, tersimpan paspor yang kini harus ia urus agar dapat kembali ke tanah air.

Kisah serupa merupakan pemandangan sehari-hari bagi fungsi imigrasi KJRI Jeddah. Sebagai gerbang utama kawasan Hijaz, Jeddah—kota pelabuhan dan pusat ekonomi di pesisir barat Arab Saudi—menjadi titik konsentrasi bagi ratusan ribu jemaah haji, jutaan jemaah umrah, serta pekerja migran Indonesia (PMI). Di sini, urusan birokrasi senantiasa berkelindan dengan persoalan spiritual dan kemanusiaan, tanpa pernah berdiri sendiri.

“Wilayah kerja kami membentang sangat luas, dari pesisir Laut Merah

hingga wilayah pegunungan di selatan Arab Saudi,” ujar Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah Okky Aditya Yaqsa membuka percakapan. Menurutnya, dinamika di Jeddah sangat unik. Berbeda dengan pos atase imigrasi di negara lain yang mungkin didominasi urusan turis atau ekspatriat profesional, Jeddah menjadi tempat berkumpulnya beragam persoalan mobilitas warga negara Indonesia (WNI).

Setiap hari Minggu sampai dengan Kamis, Gedung Yandu dipenuhi WNI yang mengurus dokumen keimigrasian. Melalui sistem “Janji Temu”, sekitar 50 permohonan paspor serta puluhan permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dilayani setiap hari.

Wilayah akreditasi KJRI Jeddah mencakup provinsi-provinsi penting di Arab Saudi, seperti Makkah Al-Mukarramah, Madinah, Tabuk, hingga Asir. Seorang WNI dari Provinsi Asir—provinsi terjauh dari Jeddah—harus menempuh perjalanan darat selama 13 jam melintasi gurun dan pegunungan. Sementara dari Tabuk, waktu tempuh yang diperlukan mencapai 8 jam.

“Untuk WNI yang jaraknya jauh, di Asir atau Tabuk misalnya, kami adakan layanan jemput bola secara berkala. Jadi, kami yang ke sana untuk memberikan layanan supaya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi dan hotel karena jauhnya jarak,” papar Okky.

Tantangan di Musim Haji dan Umrah

Bagi Imigrasi KJRI Jeddah, musim haji merupakan periode yang menantang. Dengan sekitar 200 ribu jemaah haji asal Indonesia, kehilangan dokumen menjadi hal yang niscaya dan harus diantisipasi. Tidak jarang, jemaah lansia yang terpisah dari rombongan kehilangan paspor karena seluruh dokumen biasanya dikumpulkan pada satu orang koordinator travel demi alasan keamanan. Namun, ketika koordinasi tersebut buyar, paspor pun hilang jejaknya.

Ada pula kisah jemaah yang paspornya tertinggal di Indonesia atau terselip selama proses pendistribusian dokumen dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah. Dalam situasi panik semacam itu, Imigrasi harus bertindak cepat. Prosedur penerbitan SPLP dipercepat agar jemaah tetap dapat pulang sesuai jadwal. Bahkan, petugas piket tetap disiagakan pada akhir pekan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat jemaah umrah yang harus segera bertolak kembali ke tanah air.

Di balik semua itu, terdapat isu sensitif yang juga harus terus dipantau: tinggal lajak (*overstay*). Ada banyak warga yang datang dengan visa umrah, tetapi memilih menetap untuk bekerja secara nonprosedural. Di sinilah diplo-

masi Imigrasi bekerja di balik layar. Okky menjelaskan bahwa koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, atau Jawazat, merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Melalui kunjungan kehor-matan (*courtesy call*) diplomatik yang disetujui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi, staf teknis imigrasi rutin menemui pimpinan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) *tarhil* Al-Shumayysi. Di sana, mereka mendata WNI yang terjaring razia untuk segera diterbitkan dokumen kepeluangannya. “Setiap hari, kami bisa menerbitkan 50 hingga 60 SPLP lembaran bagi WNI di dalam *tarhil* yang akan dipulangkan atau dideportasi,” jelasnya.

Mencegah Perdagangan Orang

Selain urusan dokumen, Imigrasi di Jeddah juga mengemban tugas untuk mendeteksi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyak WNI yang menjadi korban modus visa nonprosedural, seperti visa ziarah yang dijanjikan dapat digunakan untuk bekerja.

Sinergi antara fungsi imigrasi, konsuler, dan ketenagakerjaan di KJRI Jeddah menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya menangani kasus yang telah terjadi di Arab Saudi, tetapi juga memberikan umpan balik informasi ke pusat guna pencegahan keberangkatan dari Indonesia. Sosialisasi gencar dilakukan melalui media sosial maupun acara-acara besar yang dihadiri ribuan WNI di Arab Saudi agar mereka tidak mudah terbuju rayuan calo.



Staf teknis Imigrasi Jeddah menyambut kedatangan jemaah haji dari Indonesia (Foto: Dok. KJRI Jeddah)

Bagi Okky, setahun penugasan di Jeddah merupakan rangkaian pengalaman penuh tantangan. Ia mengenang masa bertugas di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Di tengah cuaca yang membakar dan lautan manusia yang penuh sesak, ia bertugas membantu lansia yang tak lagi sanggup berjalan kaki menuju tenda atau mencari jemaah yang tersesat di sela-sela kedatangan itu.

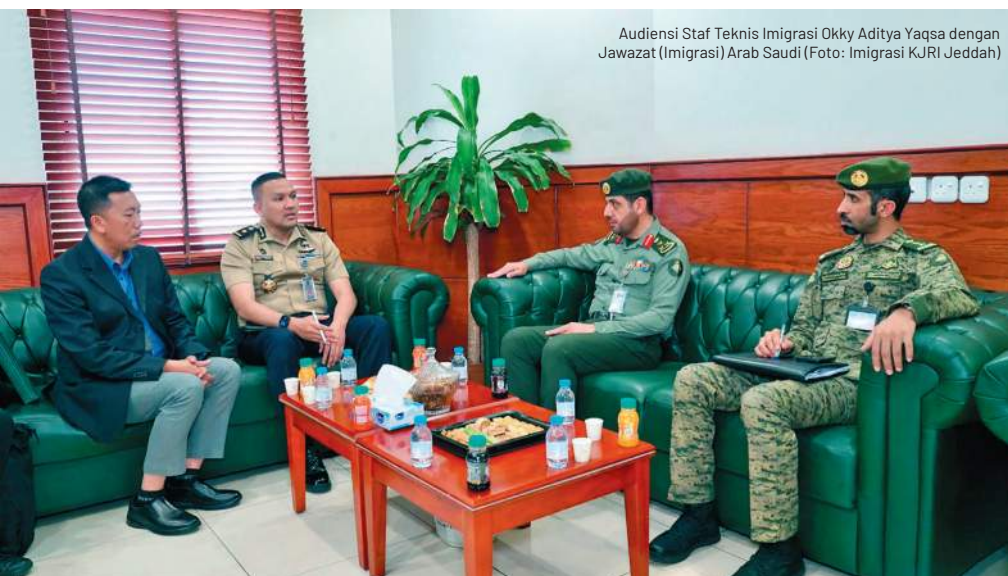
“Terlalu banyak cerita berkesan dalam satu tahun penugasan ini, dengan segala *dar-der-dor*-nya,” kenang Okky. Pengalaman menyaksikan ratusan ribu jemaah dari berbagai golongan usia berjuang menjalankan rukun Islam memberikan perspektif baru tentang makna pengabdian.

Kemanusiaan Nomor Satu

Ada satu prinsip yang selalu ditekankan Okky kepada jajarannya: tidak membiarkan warga pulang dengan rasa kecewa. Ia menyadari bahwa banyak WNI datang ke KJRI dalam kondisi psikis terguncang akibat kehilangan dokumen atau tertimpa masalah hukum.

“Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi WNI di Arab Saudi. Kami juga aktif memberikan penjelasan terkait berbagai kendala yang ada. Harapannya WNI yang mengurus dokumen di sini tidak hanya merasa nyaman, tetapi juga aman karena punya dokumen yang resmi dan pengetahuan yang cukup,” tutup Okky.

Di gerbang Hijaz, di balik penerbitan paspor dan SPLP, ada misi besar untuk menjaga martabat serta memastikan setiap anak bangsa dapat pulang dengan selamat ke pelukan keluarga di tanah air. ■



Audiensi Staf Teknis Imigrasi Okky Aditya Yaqsa dengan Jawazat (Imigrasi) Arab Saudi (Foto: Imigrasi KJRI Jeddah)



Judul Buku : *Things Left Behind: Hal-Hal yang Kita Pelajari dari Mereka yang Telah Tiada*

Penulis : Kim Sae Byoul dan Jeon Ae Won

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit : Juli 2023 (cetakan keenam)

Halaman : 199 halaman

THINGS LEFT BEHIND:

Mengasah Empati dan Profesionalisme melalui Kisah Kemanusiaan

■ Penulis: Fipit Fatimah

"Yang tersisa pada akhirnya adalah kenangan saling mengasihi dengan orang yang kita kasihi. Oleh

karena itu, buatlah banyak kenangan yang indah"

Things Left Behind: Hal-hal yang Kita Pelajari dari Mereka yang telah Tiada adalah sebuah buku nonfiksi kategori pengembangan diri yang ditulis oleh Kim Sae Byoul dan Jeon Ae Won. Buku ini menceritakan berbagai kisah nyata di balik kematian dari sudut pandang seorang pembersih profesional yang membersihkan barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal dunia.

Buku ini tidak hanya mengisahkan proses pembersihan tempat tinggal seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi juga menceritakan kisah-kisah emosional di balik proses kematiannya, hubungan antarmanusia, kepedulian, serta kesepian.

(+) Kelebihan Buku

Buku ini menampilkan kisah-kisah yang memaksa pembaca untuk melakukan refleksi akan hidup yang dijalani dan kematian seperti apa yang kelak ingin dilewati.

Selain itu, bahasa yang digunakan penulis dan penerjemah dalam bahasa

Indonesia sederhana dan mudah dipahami. Gaya tersebut mampu menggambarkan situasi emosional yang dihadapi penulis dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya bersama tim.

Buku ini menggambarkan dan mempromosikan sebuah pekerjaan yang bahkan saya sendiri tidak pikirkan, yaitu pembersih profesional. Berdasarkan kisah yang disampaikan, profesi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti tanggapan negatif dari warga sekitar lokasi kerja. Tidak jarang pula tim pembersih ditolak untuk makan di restoran setelah identitas pekerjaan mereka diketahui. Kendati demikian, penulis dan timnya tetap menjalankan tugas secara profesional dan dengan berpedoman pada prosedur kesehatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

(-) Kelemahan buku

Buku ini tidak memiliki sistematika penulisan sebagaimana buku pada umumnya. Isinya mengalir dalam satu tema karena merupakan kumpulan kisah nyata yang dialami penulis. Akibatnya, pengulangan tema terkesan

Buku ini merupakan cermin untuk menilai kembali cara kita menjalani hidup dan menjalin hubungan dengan orang lain. Melalui kisah nyata yang mengharukan, *Things Left Behind* menguji empati dan mengajak kita merencanakan akhir hidup yang lebih bermakna.

sering terjadi, seperti kesedihan, kesepian, dan hubungan dengan kerabat yang kurang harmonis. Pembaca jadi bisa menebak alur dari subbab yang digambarkan.

Selain itu, tema yang diceritakan terkadang mengandung pesan emosional yang berat.

Kesimpulan

Things Left Behind adalah bacaan yang menyentuh, reflektif, dan memberikan perspektif berbeda tentang kehidupan, kematian, serta hubungan antarmanusia. Meskipun temanya berat dan emosional, buku ini sangat bernilai sebagai sarana introspeksi dan pengembangan keterampilan nonteknis (*soft skill*), khususnya bagi pegawai imigrasi yang dituntut peka terhadap konteks sosial dan kemanusiaan dalam tugasnya.

Secara lebih spesifik, buku ini layak dibaca oleh pegawai imigrasi karena dapat meningkatkan empati dan keterampilan pelayanan publik, menguatkan pemahaman nilai kemanusiaan, menjadi alat refleksi profesionalisme, serta membuka cakrawala untuk pendekatan komunikasi yang efektif. ■



Barang bukti dugaan kejahatan love scamming yang dilakukan oleh 27 WNA di Tangerang (Foto: Alfiqri Anshari)



Antusiasme para peserta khitanan massal dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke-76 (Foto: Arif Rahman S.)



Plt. Dirjen Imigrasi, Sekretaris Ditjen Imigrasi, dan Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan menikmati makan siang pada Retret Pimpinan. (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



Sekretaris Ditjen Imigrasi menerima penghargaan kehumasan pada PRIA 2026. (Foto: Adi Wardana)



Pimpinan tinggi di lingkungan Ditjen Imigrasi dalam sesi olahraga Retret Pimpinan di Politeknik Pengayoman (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



Petugas imigrasi membimbing peserta khitanan massal yang gilirannya tiba. (Foto: Arif Rahman S.)



Penandatanganan pakta integritas oleh Menteri Imipras beserta jajaran pimpinan tinggi Ditjen Imigrasi (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



Menebar kebaikan pada Jumat Berkah oleh Ditjen Imigrasi (Foto: Tommy Ariyanto)

"TIME TRAVEL 76 TAHUN IMIGRASIKU"



Oleh: Made Donik

Segera Hadir 18 Kantor Imigrasi Baru

151 kantor imigrasi siap melayani masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.



Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 4 November 2025



Global Citizen of Indonesia (GCI)

Join now and experience a seamless connection with Indonesia's future

Visit evisa.imigrasi.go.id for the information



**IMIGRASI
INDONESIA**
www.imigrasi.go.id